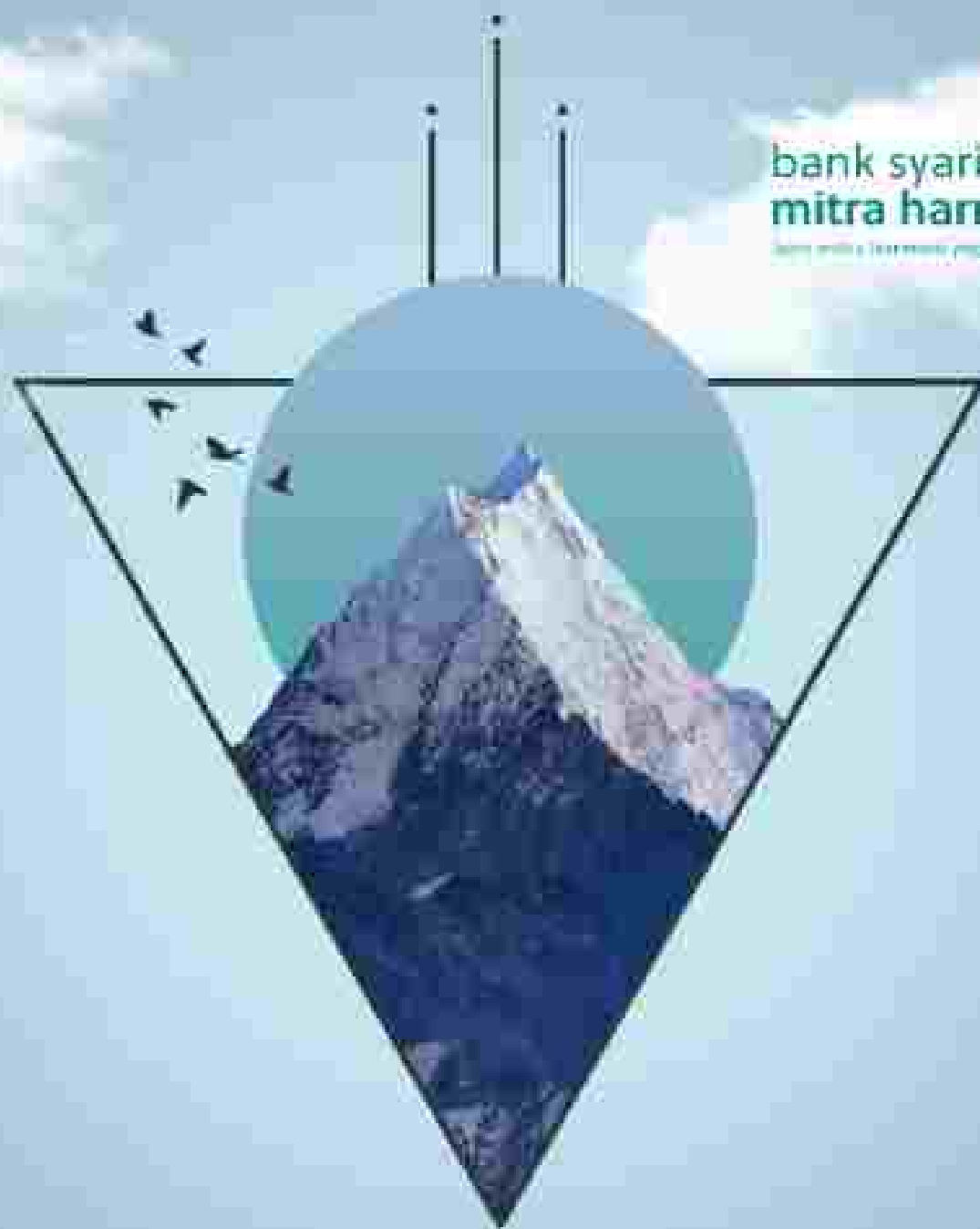


bank syariah
mitra harmoni

bank syariah mitra harmoni yogyakarta



LAPORAN TAHUNAN

— ◆ —
2024

PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA

INSKLUFIF - KOLABORATIF - BERKAH

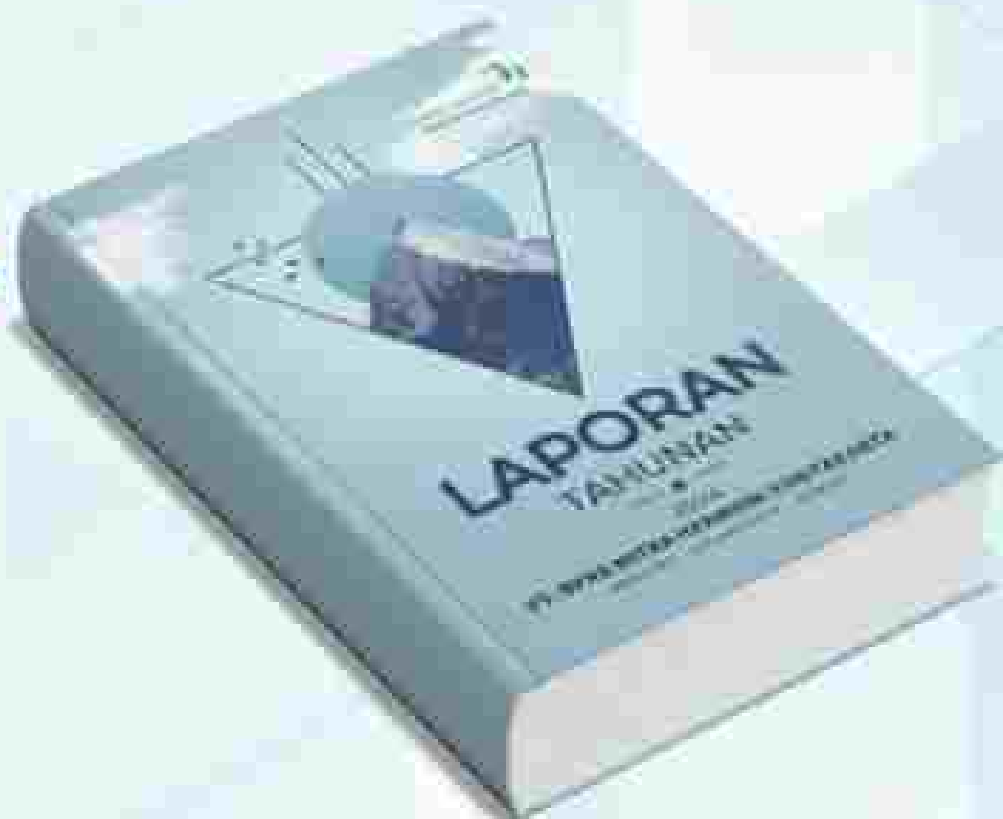
PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA
2024



"Merajut Keberkahan melalui Inklusi dan Kolaborasi"

2024

**INSKLUSIF
KOLABORATIF
BERKAH**



Tahun 2024 menjadi momentum bagi BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta untuk meneguhkan komitmen sebagai lembaga keuangan syariah yang tumbuh dengan nilai dan kebermaknaan. Dengan mengusung semangat "Merajut Keberkahan melalui Inklusi dan Kolaborasi", kinerja BPRS diarahkan tidak semata-mata untuk mencapai target finansial, namun juga memastikan terdapatnya akses layanan yang inklusif, penguatan hubungan yang kolaboratif, serta hasil usaha yang mendatangkan berkah bagi seluruh pemangku kepentingan. Capaian positif dalam peningkatan jumlah nasabah, pertumbuhan pembiayaan, serta penguatan kemitraan strategis menjadi cerminan keberhasilan BPRS dalam menghadirkan nilai tambah ekonomi sekaligus dampak sosial. Dengan tata kelola yang amanah dan pendekatan yang menyeluruh, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta terus berupaya menjadi mitra keuangan syariah yang membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas.

IKHTISAR UTAMA



KILAS KEUANGAN TAHUN BUKU 2024



10%

Kenaikan total aset sebesar 10.253.586 (dalam ribuan), selama 2023 - 2024 tumbuh sebesar 10,22%

Pertumbuhan Total Aset Yang Berkualitas



Peningkatan Pembiayaan Yang Disalurkan sebesar 5.709.192 (dalam ribuan) selama 2023 - 2024 tumbuh sebesar 6,80%

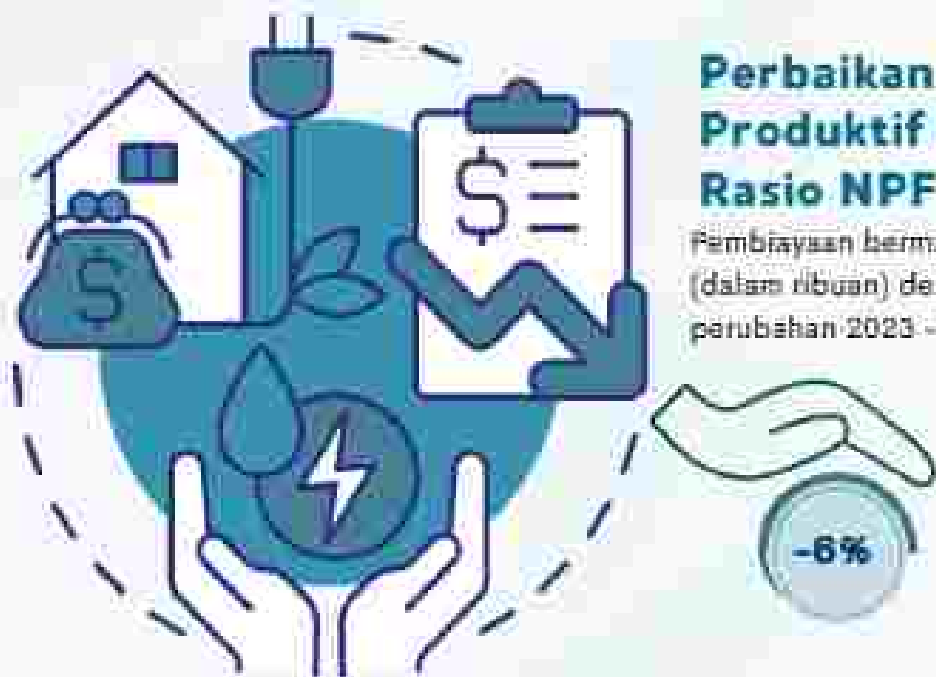
Pembiayaan Yang Disalurkan Meningkat



KILAS KEUANGAN TAHUN BUKU 2024

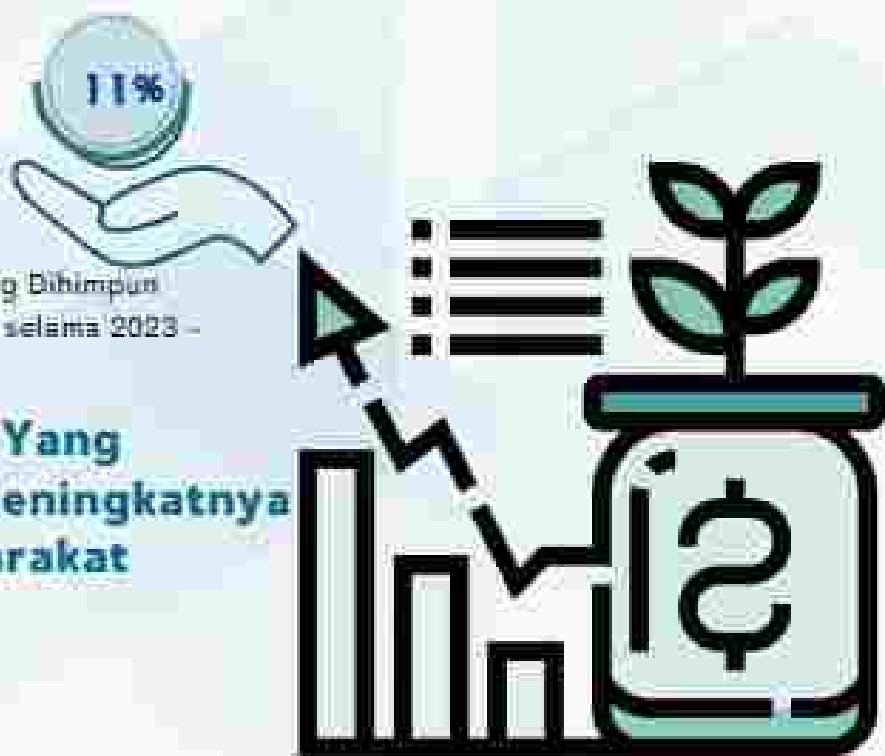
Perbaikan Kualitas Aset Produktif Dengan Turunnya Rasio NPF

Pembiayaan bermasalah/ NPF turun 536.575
(dalam ribuan) dengan posisi ratio NPF 10,04%
perubahan 2023 - 2024 tumbuh sebesar 10,22%

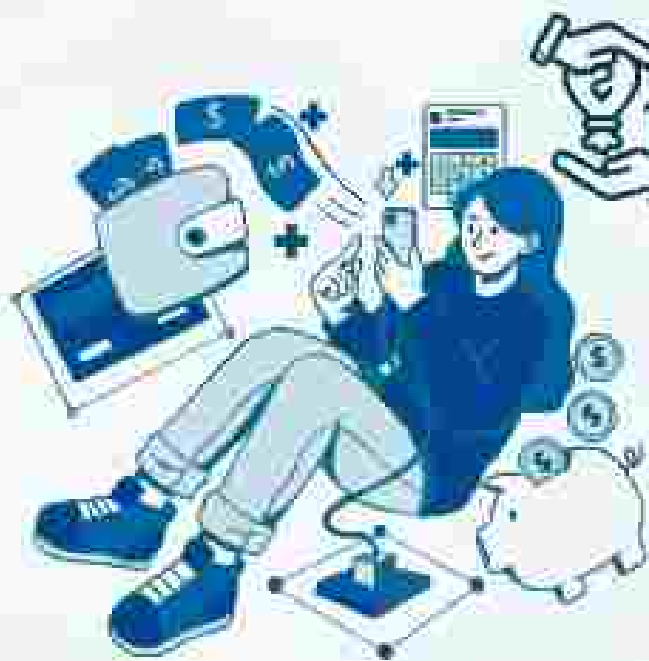


Peningkatan Dana Masyarakat Yang Dihimpun
sebesar 9.748.180 (dalam ribuan) selama 2023 -
2024 tumbuh sebesar 10,54%

Pertumbuhan Dana Yang Dihimpun Seiring Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat



KILAS KEUANGAN TAHUN BUKU 2024



Peningkatan Penghimpunan Tabungan sebesar 3.258,924 (dalam ribuan) selama 2023 - 2024 tumbuh sebesar 11,77%

Tabungan Meningkatnya



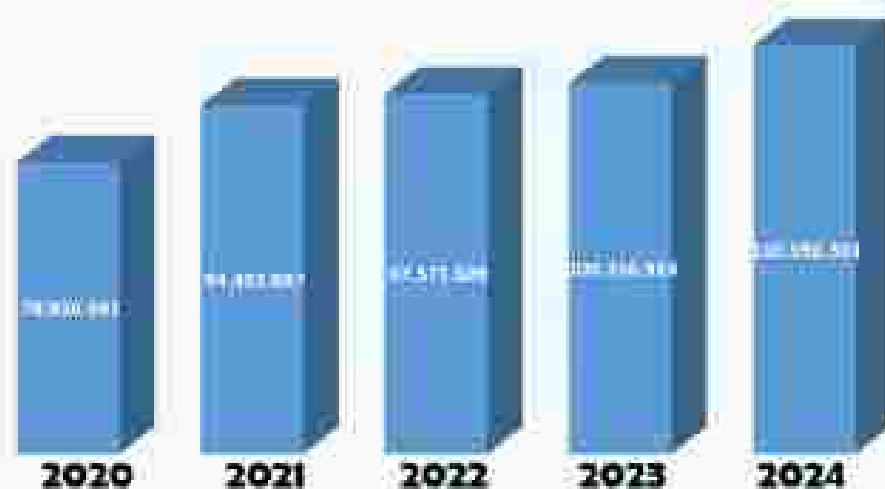
Peningkatan Deposito sebesar 7.560,800 (dalam ribuan) selama 2023 - 2024 tumbuh sebesar 11,95%

Deposito Tumbuh Signifikan

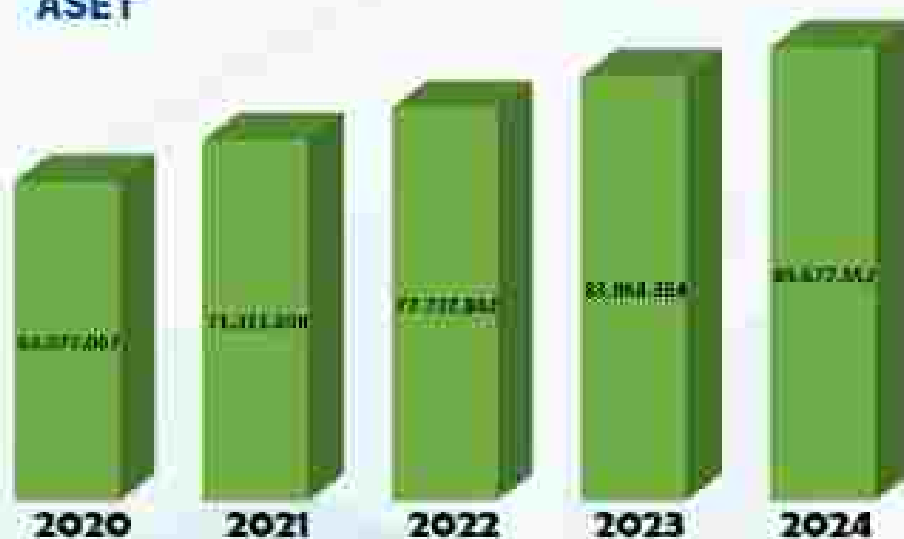


KINERJA KEUANGAN

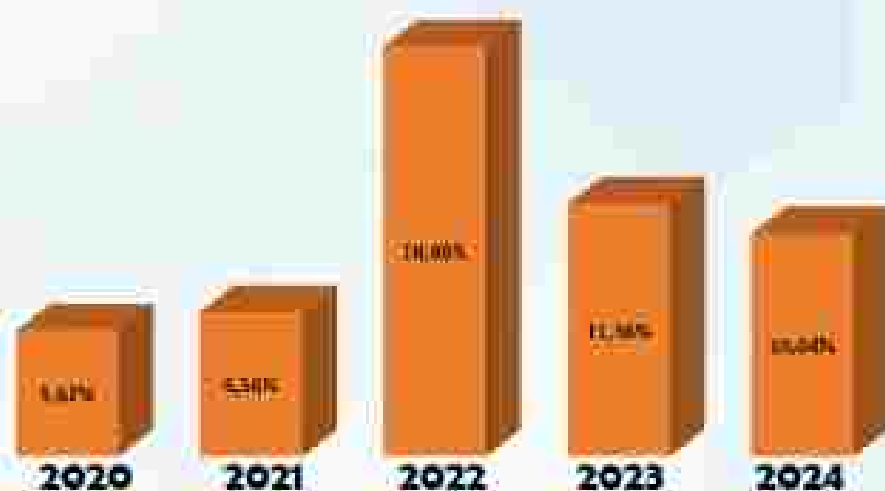
5 TAHUN TERAKHIR



ASET

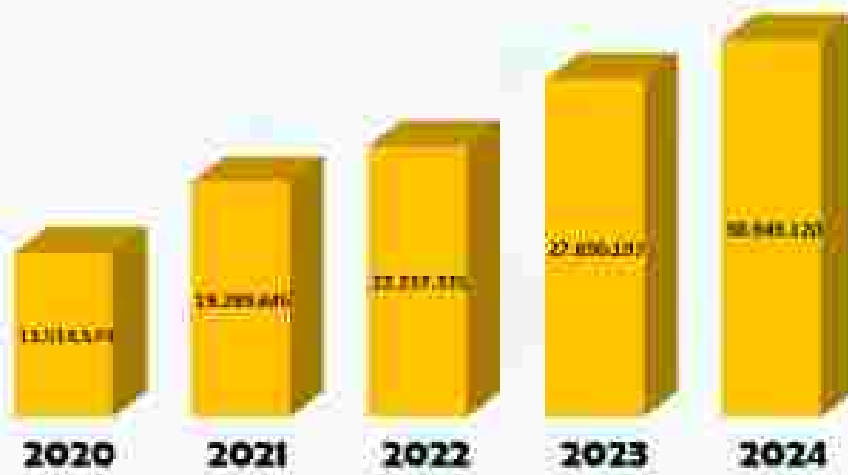


PEMBIAYAAN

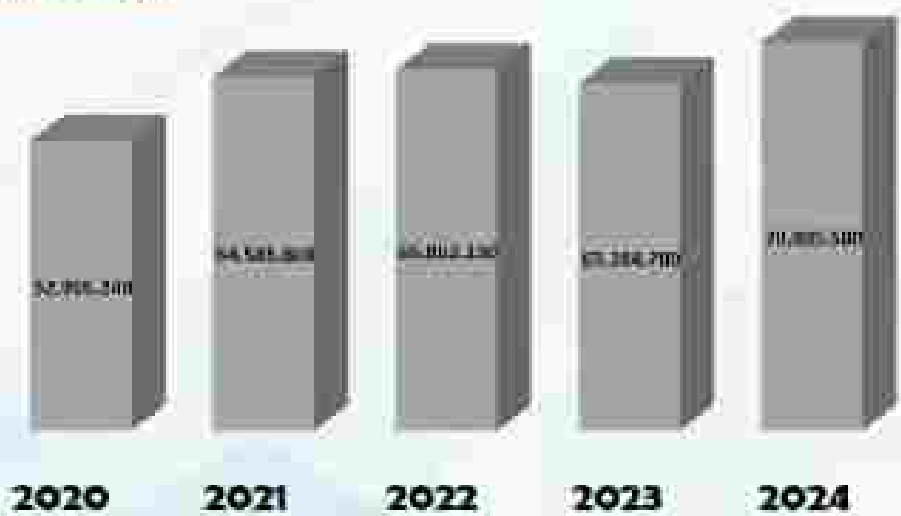


NPF

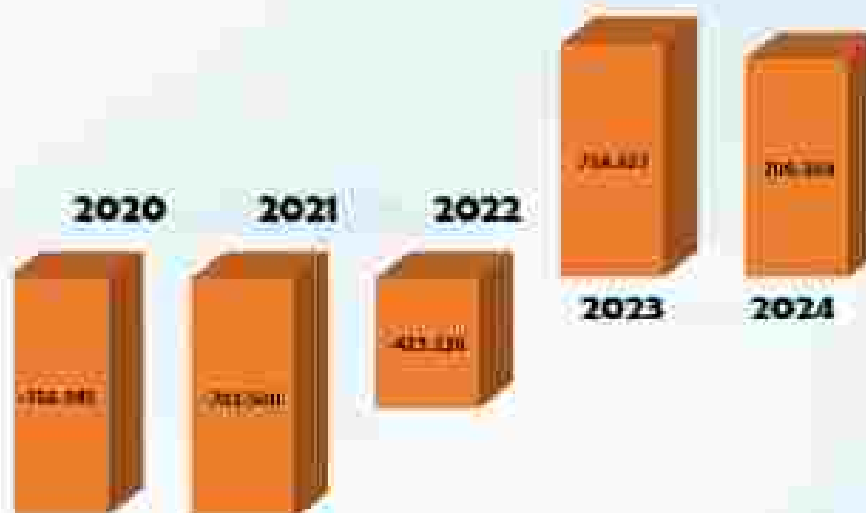
KINERJA KEUANGAN 5 TAHUN TERAKHIR



TABUNGAN

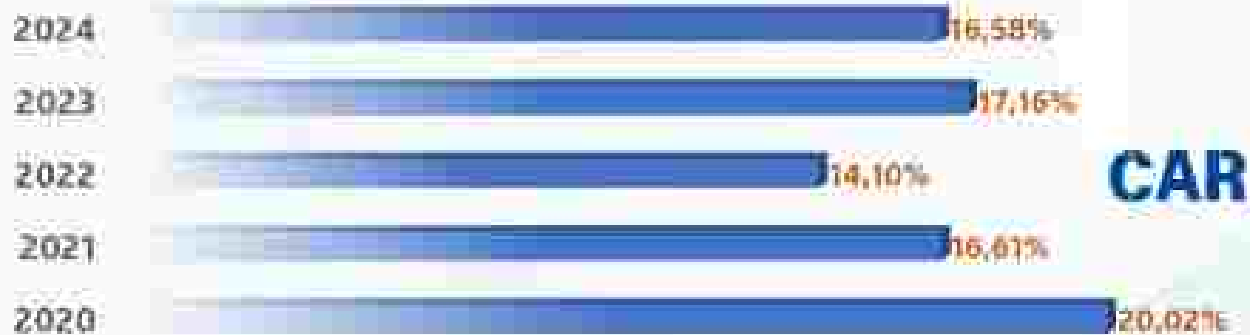


DEPOSITO



LABA RUGI

RATIO KEUANGAN 5 TAHUN TERAKHIR



LAPORAN NERACA

POS	2023 (audited)	2024 (audited)	Pertumbuhan		BBB 2024	Realisasi
			Rp.	%	Rp.	%
ASET						
Kas	260.465	283.688	23.223	8,9%	438.853	54,6%
Penempatan pada Bank Lain	14.772.996	18.435.288	3.662.291	24,8%	17.350.000	106,3%
Pembayaran Yang Diturunkan						
- Pihak & DMST	21.145.701	20.596.898	9.468.195	44,7%	20.676.160	148,0%
- Piutang Mutabah	50.067.888	42.974.338	-7.093.550	-14,2%	63.480.221	87,7%
- Pembayaran Mudharabah	10.040.073	11.014.000	973.926	9,7%	7.943.025	138,7%
- Pembayaran Musyarakah	2.050.000	4.100.900	2.050.900	100,1%	0	100,0%
- Mudharah	116.980	58.512	-58.468	-51,7%	211.252	24,5%
- Piutang Sewa	544.790	290.816	586.026	10,9%	0	100,0%
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	-1.599.366	-966.222	419.644	-29,9%	-2.356.368	-41,6%
Aset Tetap dan Inventaris	1.946.244	1.986.185	39.941	2,1%	1.236.794	88,4%
Akumulasi Penyusutan	-1.349.152	-1.680.498	-211.347	17,1%	-1.638.146	89,3%
Nilai Buku Aset Tetap dan Inventaris	697.112	525.708	-171.406	-24,6%	608.648	86,0%
Aset Lunas Lain	2.057.443	2.650.590	613.147	30,1%	1.800.888	147,3%
TOTAL ASET	100.336.914	110.590.501	10.253.587	10,2%	110.154.827	100,4%
KEWajiban						
Kewajiban Segera	600.038	470.208	-129.829	-30,3%	690.303	82,6%
- Hutang pajak	100.107	249.110	60.926	39,3%	0	100,0%
- Kepada Karabah	439.853	181.098	-258.755	-58,4%	0	100,0%
Dana Yang Diturunkan						
- Tabungan Wadiah	12.684.756	12.478.284	-206.472	-1,6%	13.460.012	81,7%
- Tabungan Mudharabah	14.854.353	18.240.368	3.386.015	23,1%	16.431.125	111,2%
- Deposito Mudharabah	64.744.780	50.905.380	-13.839.400	-13,8%	51.243.037	99,3%
- Simpanan dari Bank Lain	18.651.107	20.078.448	1.427.340	7,7%	19.086.011	105,2%
- Piutaman Mudharabah	1.532.421	460.878	-1.071.544	-69,9%	460.878	100,0%
Kewajiban Lain-Lain	185.970	249.836	63.866	5,6%	249.492	100,1%
EKUITAS						
- Modal Dasar	15.000.000	15.000.000	0	0,0%	15.000.000	100,0%
- Modal Sebelum Diotor	-3.040.000	-3.040.000	0	0,0%	-3.040.000	100,0%
- Modal Diotor	6.960.000	6.960.000	0	0,0%	6.960.000	100,0%
- Cadangan Umum	700.000	700.000	0	0,0%	700.000	100,0%
Laba(Rugi) Tahun Lalu	-1.434.919	-966.971	758.427	-52,1%	-730.524	-85,1%
Laba(Rugi) Tahun berjalan	758.427	716.348	-42.079	-6,5%	1.586.493	44,7%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	100.336.914	110.590.501	10.253.587	10,2%	110.154.827	100,4%

IKHTISAR KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI

	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Margin	13,010,837	12,765,164
Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana Non Profit Sharing	6,897,251	6,809,330
Pendapatan Neto	6,113,386	5,955,834
Pendapatan Operasional Lainnya	1,940,802	2,031,918
JUMLAH PENDAPATAN	7,953,988	7,987,752
Beban Operasional		
Beban Penyisihan Kerugian	274,872	919,126
Beban Pemasaran	284,246	200,826
Beban Tenaga Kerja	4,434,985	4,233,881
Beban Pendidikan	167,258	234,263
Beban Penyusutan dan Amortisasi	253,753	248,360
Beban Sewa	391,645	358,877
Beban Asuransi	33,246	29,221
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	58,893	46,218
Beban Barang dan Jasa	1,312,967	1,086,295
Biaya Pajak Kendaraan	7,371	7,934
Jumlah	7,324,038	7,365,002
LABA (RUGI) OPERASIONAL	629,950	622,750
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	208,345	158,016
Beban Non Operasional	(27,788)	(22,339)
Jumlah	180,557	135,677
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK	810,507	758,427
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	810,507	758,427
Pajak Penghasilan	101,138	
LABA (RUGI) SETELAH ZAKAT DAN PAJAK	709,369	758,427

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan		Porsi Pemilik Dana	
		Dibagihasilkan	Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Liabilitas Kepada Bank Lain	0	0	0,00	0	0,00
Tabungan Mudharabah	16,509,057	146,107	27,00	41,477	2,92
Deposito Mudharabah	70,805,580	624,777	35,75	228,732	3,79
a. 1 (satu) bulan	14,247,100	125,714	30,00	40,809	3,18
b. 3 (tiga) bulan	29,087,780	256,666	35,00	93,451	3,71
c. 6 (enam) bulan	17,714,000	151,894	38,00	58,211	4,02
d. 12 (dua belas) bulan	10,256,700	90,503	48,00	36,201	4,24
Pembiayaan Diterima	460,878	0	0,00	0	0,00
JUMLAH	87,831,515	770,944		770,208	

IKHTISAR KEUANGAN

RATIO KEUANGAN

Jenis Ratio	Desember 2024	Desember 2023
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,58	17,16
2. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100,00	100,00
3. Non Performing Financing (NPF) Neto	9,18	9,68
4. Non Performing Financing (NPF) Gross	10,04	11,36
5. Return on Asset (ROA)	0,70	0,78
6. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	92,84	90,61
7. Net Imbalan (NI)	7,10	8,93
8. Financing to Deposit Ratio (FDR)	108,94	91,77
9. Cash Ratio	16,18	33,88

KUALITAS ASET PRODUKTIF

ASET	Posisi Tanggal Laporan					Jumlah
	L	DPK	KL	D	M	
1. Surat Berharga Syariah						
2. Penyertaan Modal						
3. Penempatan pada Bank Syariah	17.774.874					17.774.874
4. Piutang	22.458.900	14.348.630	1.443.226	1.323.716	4.519.199	43.963.665
a. Piutang Mudharabah	22.316.277	13.589.778	1.358.309	1.286.381	4.425.792	42.976.338
b. Piutang Istisna						
c. Piutang Multijasa	15.000	40.140			1.372	56.512
d. Piutang Qardh						
e. Piutang Sewa	105.623	616.712	84.918	37.535	86.028	990.816
5. Pembiayaan Bagi Hasil	11.187.991	3.443.000	80.000		400.000	15.110.991
a. Mudharabah	7.885.000	3.043.000	80.000		6.000	11.014.000
b. Musyarakah	3.302.991	400.000			400.000	4.102.991
c. Lainnya						
Jumlah Aset Produktif	51.399.765	17.689.630	1.523.226	1.323.716	4.919.199	76.855.530
Aset Produktif kepada Pihak	118.566					118.566

PERISTIWA PENTING

NOMENKLATUR

Pada tahun 2024, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mengalami perkembangan signifikan yang berdampak langsung terhadap arah strategis dan identitas hukum perusahaan. Perubahan ini ditandai dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan melalui Akta Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn. Nomor 50 tanggal 19 Desember 2024, yang mencakup perubahan pada Pasal 1 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penyesuaian dengan ketentuan POJK No. 7 Tahun 2024, serta perubahan Pasal 3 Ayat 2 tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, dan Pasal 12 Ayat 1 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan. Dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan regulasi terkini dan penguatan kelembagaan, nama perseroan resmi diubah menjadi "PT Bank Perkeonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta", atau disingkat "PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta".

Perubahan nama dan Anggaran Dasar ini telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000060.AH.01.02.Tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025. Selanjutnya, perubahan tersebut juga telah mendapat persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP-3/KO/134/2025 tertanggal 13 Januari 2025. Perubahan ini menegaskan komitmen Perseroan dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika regulasi dan penguatan sektor keuangan syariah nasional, serta memperjelas arah pengembangan usaha ke depan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat melalui layanan perbankan syariah yang profesional, modern, dan terpercaya.

PRODUK TABUNGAN



TABUNGAN IB HARMONI

TABUNGAN IB HARMONI ADALAH PRODUK TABUNGAN YANG DIRANCANG UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN DALAM MENGELOLA KEUANGAN SEHARI-HARI DENGAN PRINSIP SYARIAH YANG MENGUTAMAKAN TRANSPARANSI DAN KENYAMANAN, SERTA FITUR-FITUR LINGKUNGAN SEPERTI KESAS BUKLA ADMINISTRASI DAN LAYANAN CEPAT TABUNGAN.

TABUNGAN IB HARMONI PLUS

TABUNGAN IB HARMONI PLUS ADALAH PRODUK TABUNGAN YANG DIRANCANG UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN DALAM MENGELOLA KEUANGAN SEHARI-HARI, DENGAN PRINSIP SYARIAH YANG MENGUTAMAKAN TRANSPARANSI DAN KENYAMANAN, SERTA TABUNGAN FITUR BERSAMAAN EMAS.



TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR

TABUNGAN IB SIMPANAN PELAJAR ADALAH PRODUK PERBANKAN YANG SAMA DENGAN PRINSIP SYARIAH, DIRANCANG UNTUK MEMBANTU PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK MELALUI SETORAN RUTIN DAN PENGELOLAAN DANA YANG AMAN.

TABUNGAN QURBANKU

ABUNGAN QURBAN ADALAH PRODUK YANG MEMUDAHKAN NASABAH DALAM MENYIAPKAN DANA UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH QURBAN, DENGAN PENGELOLAAN DANA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH, SEHINGGA IBADAH QURBAN DAPAT TERLAKSANA DENGAN MUDAH DAN TEPAT WAKTU.



TABUNGAN HAJI DAN UMRAH

TABUNGAN IB SIMPANAN PELAJAR ADALAH PRODUK PERBANKAN YANG SAMA DENGAN PRINSIP SYARIAH, DIRANCANG UNTUK MEMBANTU PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK MELALUI SETORAN RUTIN DAN PENGELOLAAN DANA YANG AMAN.



TABUNGAN ARRAFAA

ABUNGAN QURBAN ADALAH PRODUK YANG MEMUDAHKAN NASABAH DALAM MENYIAPKAN DANA UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH QURBAN, DENGAN PENGELOLAAN DANA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH, SEHINGGA IBADAH QURBAN DAPAT TERLAKSANA DENGAN MUDAH DAN TEPAT WAKTU.



TABUNGAN UKHUWAH

TABUNGAN IB SIMPANAN PELAJAR ADALAH PRODUK PERBANKAN YANG SAMA DENGAN PRINSIP SYARIAH, DIRANCANG UNTUK MEMBANTU PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK MELALUI SETORAN RUTIN DAN PENGELOLAAN DANA YANG AMAN.

PRODUK PEMBIAYAAN



PEMBIAYAAN MULTIGUNA

PEMBIAYAAN IS HARMONI MULTIGUNA DENGAN PRINSIP SETERAKIPAN INI DITUJUKAN KEPADA MASYARAKAT LIDAS YANG BERTUJUAN UNTUK PENGAJARAN BARANG-BARANG MODAL KERJA DAN INVESTASI KEPERLUAN KENDARAAN BERKOTOR, RENCANA RUMAH TINGGAL SERTA SEBAGAI MACAM-KEBUTUHAN LAINNYA YANG MENGGUNAKAN PRINSIP TUAL BELI

PEMBIAYAAN MULTUASA

PEMBIAYAAN IS HARMONI DENGAN PRINSIP DAKAH MULTUASA YANG SELALU DENGAN PERMITAN MASYARAKAT MAHA EPRE MITRA HARMONI MENENTUKAN PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN DANA UNTUK BIAYA RUMAH SAKIT / OPNAME, BIAYA PENDIDIKAN DAN SISA LAIN YANG MENGGUNAKAN PRINSIP DAKAH MULTUASA



PEMBIAYAAN MULTIUSAHA

PEMBIAYAAN IS MULTIUSAHA DENGAN PRINSIP BAKU HASIL / MUTUHASABAH DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBIAYAI USAHA-USAHA YANG PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT DENGAN PRINSIP KESERAKATAN BAKU HASIL / MUTUHASABAH BAKU DALAM PEMASARANNYA LEBIH SELEKTIF MEMILIH CALON MITRANYA SEPERTI KERADA SARA KASABAH YANG SUDAH MENJADI MITRA DAN TERBUKTI ANGKUTANNYA BAKU KAREKA PRINSIP BAKU HASIL INI MEMERLUKAN ADANYA PARTISIPASI AKTIF DARI SARA KASABAH



PEMBIAYAAN SEWA

PEMBIAYAAN IS HARMONI DENGAN PRINSIP WARAH DENGAN PERMITAN MASYARAKAT MAHA EPRE MITRA HARMONI MENENTUKAN PEMBIAYAAN BAGI MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN DANA UNTUK BIAYA SEWA RUMAH/ALAT/ALIRAN KANTOR YANG MENGGUNAKAN PRINSIP WARAH MERUPE



PEMBIAYAAN SOSIAL

PEMBIAYAAN IS HARMONI DENGAN PRINSIP QARIN YANG TERHUBUNG DENGAN ADANYA PEMBIAYAAN DENGAN BERSI PUTANG PEMBIAYAAN BERSAMA SERTAKAN DENGAN EPRE TI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MENGGUNAKAN PRINSIP QARIN YAITU UNTUK TUJUAN SOSIAL





PROFIL PERUSAHAAN

BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta didirikan pada tahun 2009 berdasarkan akta No.20 tanggal 5 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Wahyu Wiryono,S.H. Notaris yang berkedudukan di Yogyakarta, akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-20198.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009. Mulai beroperasi tanggal 16 April 2010, dan Grand Opening pada tanggal 20 April 2010 yang diresmikan oleh Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta.

BPRS beralamatkan di Jl. Doktor Sutomo Nomor 7 Bausasaran, Danurejan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan akta No.7 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn. Notaris yang berkedudukan di Jakarta; para pemegang saham Bank menyetujui pemindahan alamat kantor pusat yang sebelumnya beralamat di Jl. Prof. Yohanes No. 36 Taman, Gondokusuman, Kota Yogyakarta menjadi Jl. Dr. Sutomo No. 7 Bausasaran, Danurejan, Kota Yogyakarta. Dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-637 / KO.031 / 2017 tanggal 24 Oktober 2017.

PERIJINAN

Perijinan Pusat :

- Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perseroan : No. 20 dibuat oleh Waluyo Wiryono,SH notaris di yogyakarta tanggal 6 Maret 2009, disahkan Mahkamah No.AHU-20198-AH.01 tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009, Terakhir kali diubah pada Akta tanggal 18 Januari 2022 Nomor 17, dibuat di hadapan nyonya Djumini Setyoadi, SH, MKn dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0041519.
- Anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 50 tanggal 19 Desember 2024 oleh notaris Ny. Fitri budiani, SH, MKn dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat No. No: AHU-0000060-AH.01.02 Tahun 2025 yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Ijin Usaha : Gubernur Bank Indonesia, No.12/12/Kep.GBI/DpG/2010 tanggal 25 Februari 2010

Perijinan Daerah :

- Tanda Daftar Perusahaan : No. 120516501540 tanggal 28 Juli 2009, dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- NPWP : 02.961.202.S.541.000 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
- Ijin Gangguan : No. 0800/0688/GK/2009 tanggal 16 Juli 2009 dari Pemkot Yogyakarta

Nomenklatur :

- Terjadi perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Notaris Fitri Budiani, S.H., M.Kn. No. 50 pada tanggal 19 Desember 2024 mengenai perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK No. 7 Tahun 2024, Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, serta Pasal 12 Ayat 1 Anggaran Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan. Maka dari itu, Perseroan Terbatas ini berganti nama menjadi "PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta" atau disingkat "PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta". Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000060-AH.01.02 Tahun 2025 pada tanggal 2 Januari 2025, dan telah mendapatkan Persetujuan dari OJK melalui Keputusan Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP-3/KO.134/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Perubahan Nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta.

STRUKTUR KEPEMILIKAN

Modal dasar perseoran adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi dalam 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal per saham adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Besarnya modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan akta No 32 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dihadapan Ny Djumini Setyoadi, SH., Mkn. Notaris yang berkedudukan di Jakarta, adalah sebesar Rp6.960.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah). Komposisi modal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal		
	Lembar Saham	Nilai Saham	Persentase %
A. Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
B. Modal Disetor			
a. PT. Sentra Modal Harmoni	6.955	6.955.000.000	99,93%
b. Mohamad Indra Permana	5	5.000.000	0,07%
Jumlah Modal Disetor	6.960	6.960.000.000	100,00%

VISI MISI PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA

**Menjadi Bank Yang Terpercaya
Dan Membangun Masa Depan**



01

Mendayagunakan seluruh asset Perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin

02

Menjalin kemitraan secara professional dan saling menguntungkan dengan seluruh Stakeholders untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis

03

Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi Stakeholders

04

Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

05

Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik



BUDAYA ORGANISASI

I

Integritas

Pemimpin harus berintegritas tinggi, menjunjung kejujuran, keadilan, serta prinsip syariah dan etika perusahaan.

C

Cerdas

Pemimpin harus cerdas, mampu mengambil keputusan tepat, kreatif mencari solusi, dan adaptif terhadap perubahan.

R

Ramah

Pemimpin harus ramah, sopan, dan santun dalam bergaul dan membangun hubungan harmonis di semua lapisan.

O

Optimis

Pemimpin harus optimis, berpikiran positif dan mendorong tim untuk pantang menyerah menghadapi tantangan.

L

Loyal

Pemimpin harus loyal dan memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan bersama, dan menjaga reputasi perusahaan.

I

Ikhlas

Pemimpin harus ikhlas, penuh pengabdian, dan menjadikan kerja sebagai kontribusi terbaik bagi perusahaan.

M

Mulia

Pemimpin harus berorientasi pada keberlanjutan, beretika, mengedepankan nilai mulia, dan memberi manfaat luas.

JARINGAN KANTOR



KANTOR PUSAT



KANTOR KAS GWANGANG



KANTOR PUSAT

Jl. Doktor Susanto No.03, Balusastran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55211

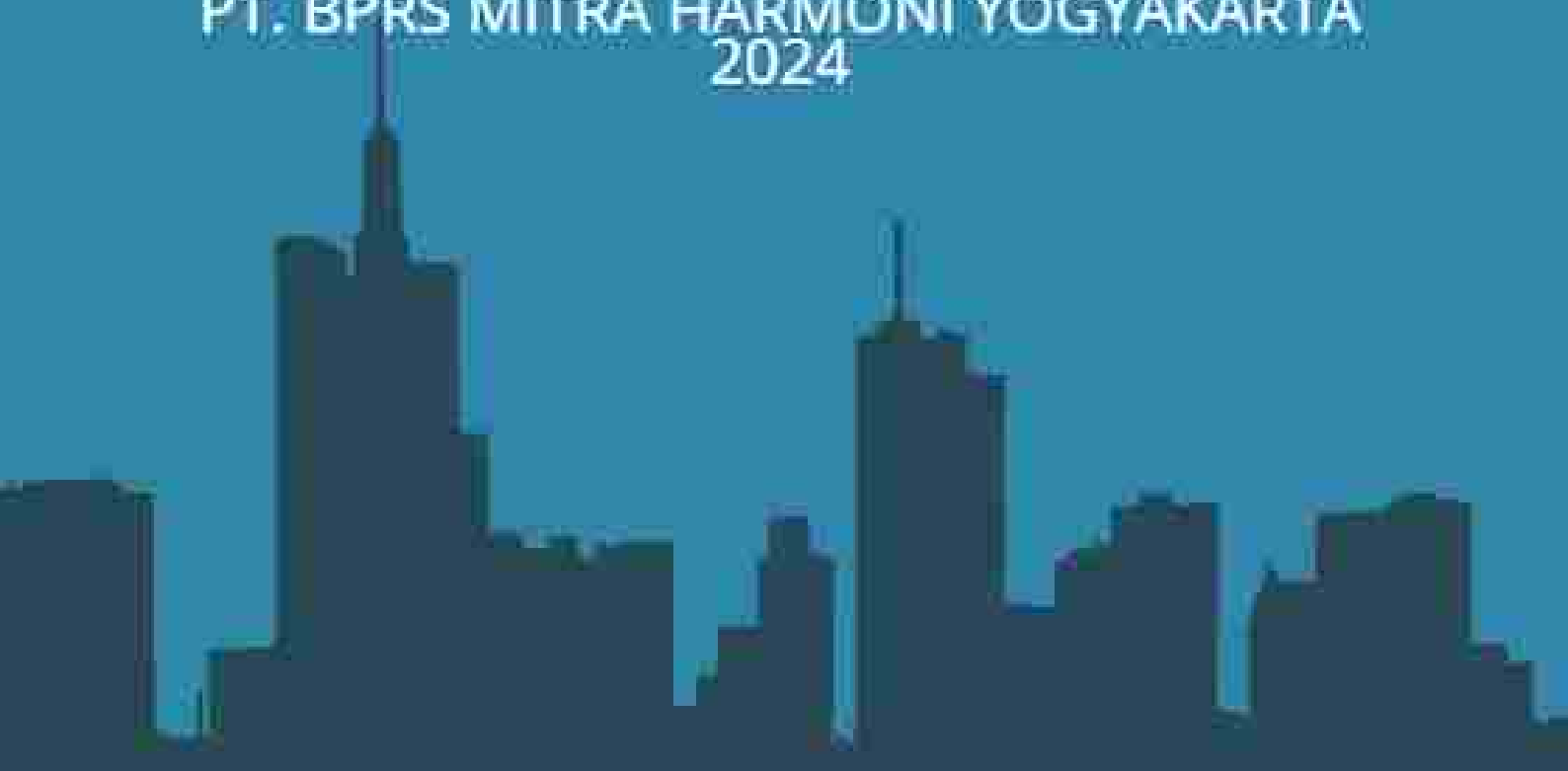
KANTOR KAS

Jl. Imogiri Tim., Gwangang, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163



SUMBER DAYA INSANI

PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA
2024



SUMBER DAYA INSANI

PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa menempatkan pengembangan kapasitas dan karakter sumber daya insani (SDI) sebagai prioritas strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Komitmen ini tercermin melalui berbagai program penguatan kompetensi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keahlian teknis di bidang perbankan syariah, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman serta konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional. Dengan demikian, diharapkan seluruh insan perusahaan dapat menjadi representasi nilai-nilai syariah yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas tinggi.

Di samping itu, peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang unggul dan berorientasi pada kepuasan nasabah menjadi perhatian utama, mengingat peran nasabah sebagai mitra utama dalam pertumbuhan bank. PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta juga berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap kemajuan perusahaan. Untuk mendukung tujuan tersebut, manajemen telah mengimplementasikan sejumlah strategi dan kebijakan yang terintegrasi guna mendorong peningkatan kualitas SDI secara menyeluruh, antara lain:

- **Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan:** PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai program pelatihan, seminar, workshop, serta sertifikasi di bidang perbankan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Program-program ini diselenggarakan bekerja sama dengan Holding Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asbisindo, dan lembaga pelatihan dari lembaga terpercaya lainnya.
- **Peningkatan Kesejahteraan dan Motivasi:** Perusahaan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif serta menyediakan berbagai fasilitas penunjang dan fleksibilitas waktu kerja. Selain itu terdapat penghargaan untuk karyawan teladan, karyawan favorit, dan karyawan dengan masa kerja tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan.
- **Integritas dan Etika Profesional:** Seluruh karyawan ditanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan moral baik dalam hubungan kerja internal maupun pelayanan terhadap nasabah.
- **Kolaborasi dan Kerja Sama Tim:** PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta terus membangun budaya kerja ICROLIM yang inklusif dan kolaboratif dengan memperkuat sinergi antar bidang. Lingkungan kerja yang saling mendukung dan menghargai menjadi dasar terciptanya tim yang solid dan produktif.
- **Inovasi dan Kreativitas:** Perusahaan mendorong setiap individu untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir inovatif, khususnya dalam mencari solusi terhadap tantangan bisnis serta meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah.
- **Etos Kerja dan Pelayanan Prima:** Setiap insan BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta ditanamkan sikap kerja yang jujur, profesional, amanah, dan bertanggung jawab. Kemampuan dalam memahami kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati menjadi prioritas utama dalam operasional sehari-hari.
- **Pembinaan Keagamaan Berkelanjutan:** Untuk mendukung pembentukan karakter spiritual yang kuat, perusahaan memfasilitasi kegiatan pembelajaran agama Islam secara rutin melalui kajian, diskusi, dan aktivitas keagamaan lainnya guna memperkuat keimanan dan penerapan nilai-nilai syariah dalam pekerjaan.

KOMPOSISI KARYAWAN



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI

Selama tahun 2024, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta secara konsisten menjalankan berbagai program strategis guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya insani (SDI) sebagai bagian dari komitmen pengembangan berkelanjutan. Adapun program-program tersebut antara lain:

1. Proses Rekrutmen Selektif dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan guna mendukung efisiensi dan efektivitas operasional.
2. Evaluasi Kinerja Berbasis Penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan dilakukan secara berkala setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja baik secara individual maupun organisasi secara objektif dan terukur.
3. Pembinaan Keagamaan Rutin dengan menyelenggarakan kajian keislaman bulanan sebagai upaya penguatan spiritualitas karyawan. Program ini bertujuan menambah wawasan dan pemahaman agama sehingga mampu membentuk karakter SDI yang berintegritas dan selaras dengan prinsip syariah.
4. Sosialisasi Kebijakan perusahaan dilakukan secara langsung. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi serta memberikan edukasi internal terkait arah kebijakan dan tata kelola perusahaan.
5. Perlindungan Karyawan melalui Program Jaminan Sosial kepada Seluruh karyawan BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta untuk mendapatkan perlindungan melalui program asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan hari tua yang difasilitasi melalui BPJS Ketenagakerjaan.
6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan berbagai program yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan SDI sesuai kebutuhan perusahaan dan perkembangan industri perbankan syariah.

The logo is a circular emblem with a dark green outer ring and a lighter green inner circle. The text is centered within the inner circle. The words "bank syariah" are in a dark green sans-serif font, followed by "mitra harmoni" in a bold, dark green sans-serif font. To the right of the text is a stylized icon consisting of two overlapping green rectangles. Below the main text, "bprs mitra harmoni yogyakarta" is written in a smaller, dark green sans-serif font.

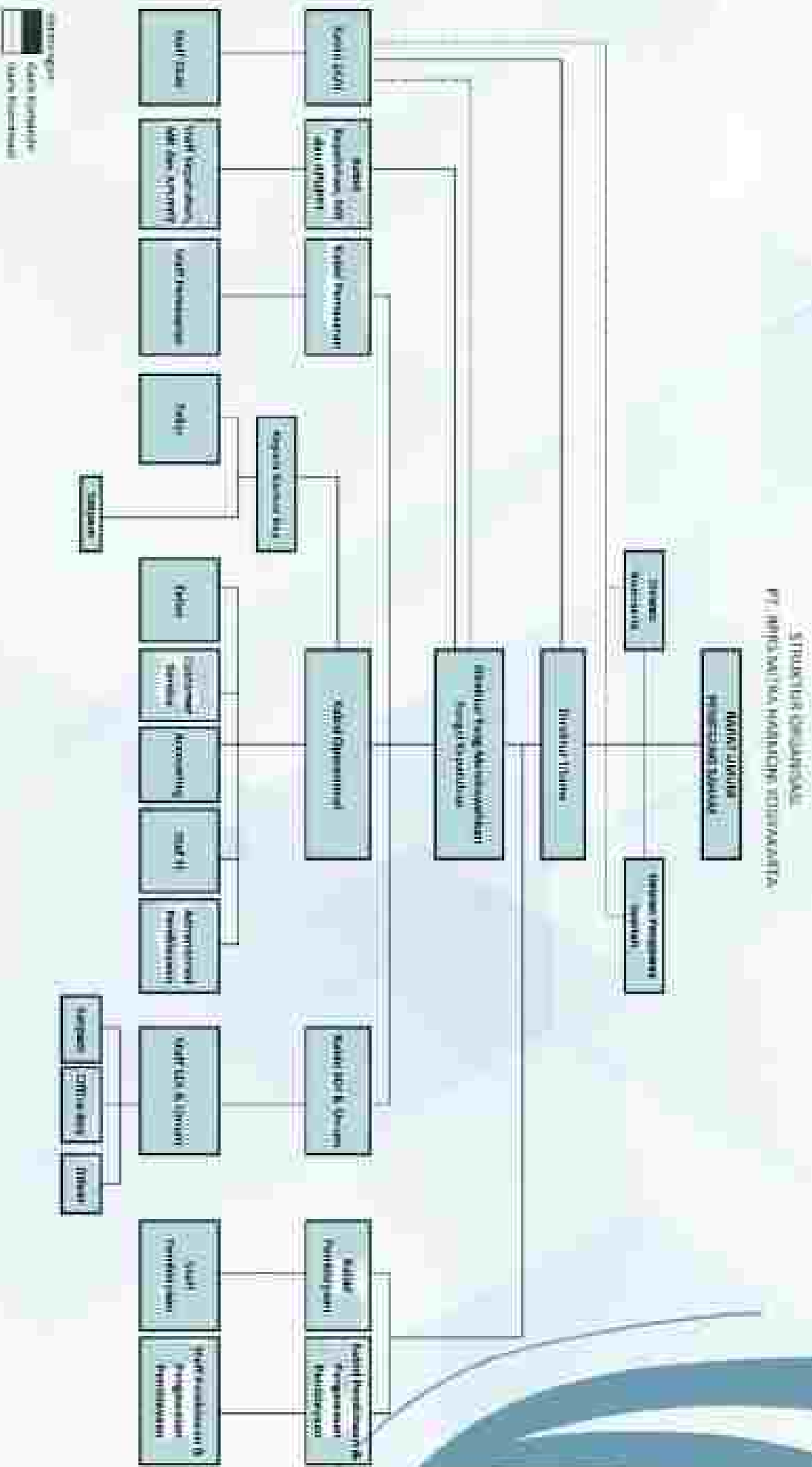
bank syariah
mitra harmoni

bprs mitra harmoni yogyakarta



LAPORAN MANAJEMEN

STRUKTUR ORGANISASI





ANGGOTA DPS

Profil

Sumetep, 19 Januari 1963
Glagah Kidul RT. 02 Tamanan
Banguntapan Kab. Bantul

Pendidikan Formal

Pasca Sarjana Universitas Islam
Indonesia (M.Hum)

Pendidikan Non Formal

Sertifikasi Pengawas Syariah - Lembaga
Certif LSPM (2023)

Pengalaman Kerja

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Anggota DPS BPRS Mitra Amal Mulia
Anggota DPS BPRS Mitra Harmoni Kota
Semarang

Tanggal Mulai Menjabat

24 Maret 2022

Nomor SK Persetujuan Otoritas

S-30/KO.031/2023

DRS. ABDUL HALIM, M.HUM

KOMISARIS UTAMA

Profil

Bantul, 12 Juni 1960
Soropaten, RT. 04 Ringinharjo Bantul,
Kab. Bantul

Pendidikan Formal

Universitas Islam Indonesia (SH)

Pendidikan Non Formal

Sertifikasi Komisaris - Lembaga Certif
LSPM (2021)

Pengalaman Kerja

Direktur Utama BPR Nusamba:
Banguntapan (1990-1993)
Direktur Utama BPR Nusamba Temon
(1993-1994)
Direktur Utama BPR Nusamba:
Adiwerna (1997-1999)
Komisaris Utama BPR Nusamba:
Adiwerna (2007-2010)
Komisaris Utama BPR Nusamba Temon
(2006-Sekarang)
Komisaris Utama BPR Nusamba
Banguntapan (2006-Sekarang)

Tanggal Mulai Menjabat

24 Maret 2022

Nomor SK Persetujuan Otoritas

S-30/KO.031/2023



ROHADI, SH



KOMISARIS

Profil

Indramayu, 24 Juli 1970
Perum Bumi Mondoroko Raya Blok AE
19 Watugede Singosari Kab. Malang

Pendidikan Formal

Universitas Tulungagung Jawa Timur
(SE)

Pendidikan Non Formal

Sertifikasi Komisariss - Lembaga Certif
LSPM (2021)

Pengalaman Kerja

Staf Pemasaran BPR nusamba
Haurgeulis Indramayu (1996-2000)
Kabid. Pemasaran BPR nusamba
Haurgeulis Indramayu (2000-2001)
SPI BPR Nusamba Wlingi (2001-2003)
Direktur BPR Nusamba Nguntit (2003-
2004)
Direktur BPR Nusamba Brondong (2005-
2011)
Direktur Utama BPRS Mitra Harmoni
Kota Malang (2011-2017)

Tanggal Mulai Menjabat

18 April 2022

Nomor SK Persetujuan Otoritas

S-30/KO.031/2023

JUANDA, SE

DIREKTUR UTAMA

Profil

Cilacap, 15 Juni 1970
Kalidengen II, RT 07 RW 04 Kalidengen
Temon Kab. Kulonprogo DIY

Pendidikan Formal

STIE SBI Yogyakarta (SE)

Pendidikan Non Formal

Sertifikasi Direktur Tk. 1 - Lembaga Certif
LSPM (2022)

Pengalaman Kerja

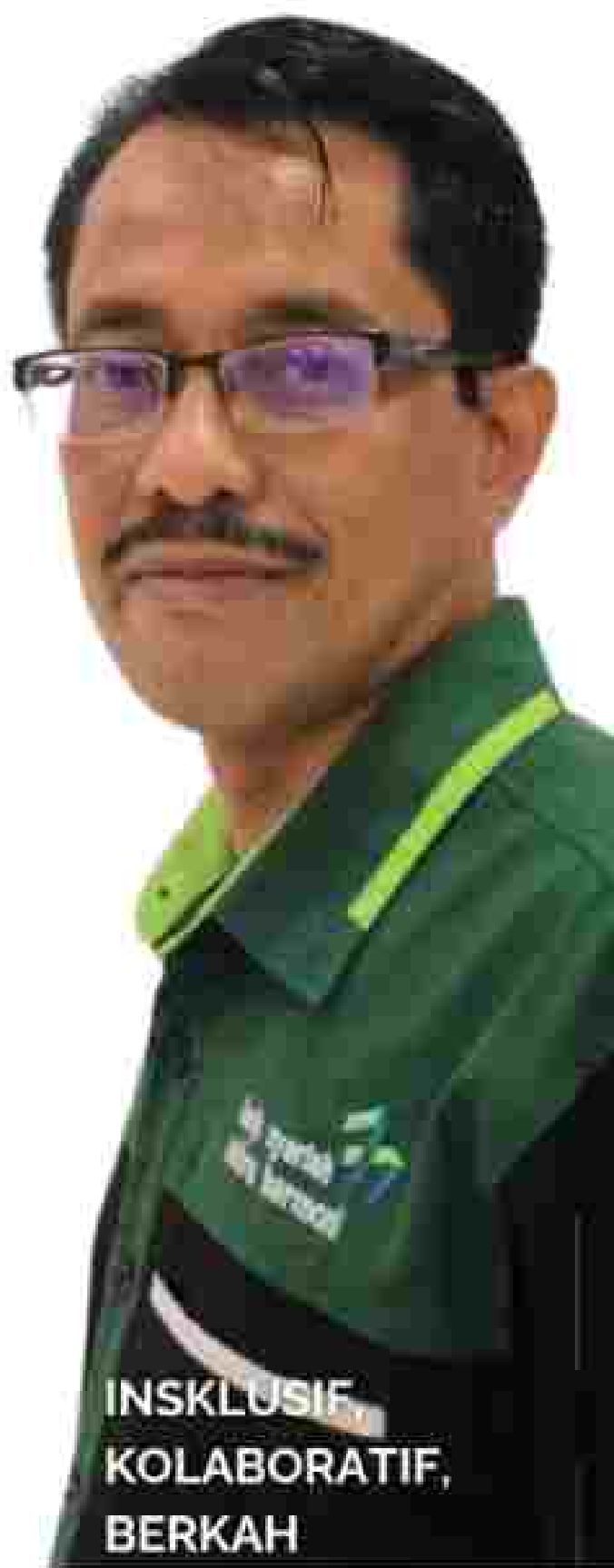
Staf Kredit BPR Nusamba Temon (1990-
1997)
Kabid. Pemasaran BPR Nusamba Temon
(1997-2001)
Kabid. Kredit BPR Nusamba Temon
(2001-2002)
Direktur BPR Nusamba Brondong (2002-
2004)
Direktur Utama BPR Nusamba Temon
(2004-2007)
Direktur BPR Nusamba Banguntapan
(2007-2010)

Tanggal Mulai Menjabat

24 Maret 2022

Nomor SK Persetujuan Otoritas

S-30/KO.031/2023



JOKO RISWANTO, SE



**INSKLUSIF
KOLABORATIF
BERKAH**

DIREKTUR

Profil

Wonosobo, 16 Mei 1977

Sucen RT.001 RW.004 Triharjo, Sleman,
D.I. Yogyakarta

Pendidikan Formal

Universitas Sebelas Maret (SP)

Pendidikan Non Formal

Sertifikasi Direksi Tk 1 - Lembaga Certif
LSPM (2020)

Pengalaman Kerja

Staf Kredit BPRS Nusamba Banguntapan
(2004-2010)

Kabid. Pembiayaan BPRS Mitra Harmoni
Yogyakarta (2010-2018)

Kabid. Operasional BPRS Mitra Harmoni
Yogyakarta (2019)

Tanggal Mulai Menjabat

7 Desember 2022

Nomor SK Persetujuan Otoritas

S-30/KO.031/2023

KRISNAWAN FARID HILAL, SP

PEJABAT EKSEKUTIF

KEPALA BAGIAN OPERASIONAL

Aryun Nirma Rahmawati, SEsy

SK Pengangkatan:

72/MHY/DIR/SK/VI/2019

Mulai Menjabat:

09 Desember 2019



KEPALA BAGIAN SDM & UMUM

Sendy Vitasari, SSI

SK Pengangkatan:

06/MHY/DIR/SK/III/2012

Mulai Menjabat:

09 Maret 2012

PEJABAT EKSEKUTIF

KEPALA BAGIAN PEMASARAN

Benida Ikawati, SE

SK Pengangkatan:

05/MHY/DIR/SK/2019

Mulai Menjabat:

02 Januari 2019



KEPALA BAGIAN PEMBIAYAAN

Rachmat Setiabudi

SK Pengangkatan:

099/MHY/DIR/SK/X/2022

Mulai Menjabat:

05 Oktober 2022



PEJABAT EKSEKUTIF

KEPALA BAGIAN PEMBINAAN, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Bekti Widanta, SPd

SK Pengangkatan:

126/MHY/DIR/SK/XI/2021

Mulai Menjabat:

17 November 2021



KEPALA KANTOR KAS GIWANGAN

Ridzo Nur Maula, SKom

SK Pengangkatan:

69/MHY/DIR/SK/X/2023

Mulai Menjabat:

5 Oktober 2023

PEJABAT EKSEKUTIF

KEPALA BAGIAN KEPATUHAN, MANAJEMEN RISIKO, & APU PPT

Wahyu Hartarto, SE

SK Pengangkatan:

72/MHY/DIR/SK/VI/2019

Mulai Menjabat:

09 Desember 2019



KEPALA BAGIAN AUDIT INTERNAL Ade Ahmad Wijaya, SE, MSI

SK Pengangkatan:

72/MHY/DIR/SK/VI/2019

Mulai Menjabat:

09 Desember 2019



LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI Wt. Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Hanya kepada-Nya kita memohon rahmat dan pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi sejak tanggal 30 April 2010, PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan salah satu organ penting dalam struktur tata kelola perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas usaha bank.

Selubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyampaikan Laporan Pengawasan atas Penerapan Prinsip Syariah pada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta sebagaimana uraian berikut:

- Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Audit Internal (FEAI) serta hasil evaluasi Dewan Pengawas Syariah, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan penghimpunan dana telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariah, sedangkan penyaluran dana dan pelayanan jasa yang meliputi pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, multijasa, serta pembiayaan ulang (refinancing) syariah melalui skema akad al-bay' wa al-ijarah dengan mekanisme ijarah muntahiyah bil tamlik (IMBT), telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- Aktivitas penghimpunan dana melalui produk tabungan di PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, baik yang menggunakan akad wadiah maupun mudharabah, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan program tabungan yang disertai dengan pemberian hadiah kepada nasabah juga telah mengacu dan memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana oleh Lembaga Keuangan Syariah, sehingga secara keseluruhan aktivitas penghimpunan dana tersebut dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.



- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen deposito bahwa pelaksanaan telah memenuhi ketentuan prinsip syariah. Bank memberikan informasi secara lengkap kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis mengenai perayatan akad mudharabah; formulir aplikasi deposito telah diisi secara lengkap sebagai bagian dari pemenuhan rukun dan syarat jab-qabul; setoran deposito mencantumkan jumlah nominal dan jenis mata uang secara jelas; kesepakatan pembagian keuntungan (nisbah) dicantumkan dalam akad pembukaan rekening dalam bentuk persentase; serta telah dilakukan penandatanganan akad oleh nasabah sebagai shahibul maal dan pihak bank sebagai mudharib. Berdasarkan temuan tersebut, Dewan Pengawas Syariah menyimpulkan bahwa aktivitas penghimpunan dana melalui produk deposito di PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pembiayaan dengan akad Murabahah, ditemukan bahwa implementasi produk tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, antara lain: para pihak memiliki kecakapan hukum (ahliyatul ada'), objek akad berupa barang halal dan tidak bertentangan dengan syariah, pembiayaan dilakukan berdasarkan permintaan nasabah disertai akad wakalah yang terpisah, proses jual beli dilakukan setelah barang menjadi milik bank dengan bukti yang sah, serta adanya dokumen pendukung berupa faktur atau kwitansi pembelian yang valid. Dalam hal pembelian barang second atau bahan bangunan, penggunaan kwitansi isian yang dapat dipertanggungjawabkan diperbolehkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian untuk menghindari praktik side streaming. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pengawas Syariah menilai bahwa aktivitas pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
- Berdasarkan hasil uji petik dokumen pembiayaan mudharabah di PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, Dewan Pengawas Syariah menilai bahwa pelaksanaan akad secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Akad dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum, dengan jab-qabul yang jelas, dana disalurkan penuh dalam bentuk tunai, usaha dijalankan sesuai kesepakatan, serta nisbah keuntungan disepakati di awal. Meskipun sebagian besar nasabah merupakan pelaku usaha mikro dan belum menyusun laporan hasil usaha secara tertulis, DPS merekomendasikan edukasi pencatatan arus kas sederhana guna mendukung akurasi perhitungan bagi hasil.
- Dewan Pengawas Syariah menilai bahwa pelaksanaan akad ijarah secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Para pihak yang terkait dalam akad memiliki kecakapan hukum (ahliyatul ada'), jab-qabul dinyatakan secara eksplisit, penggunaan manfaat barang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, besaran upah disepakati sejak awal dalam bentuk nominal, serta akad ditandatangani oleh nasabah sebagai mustajir dan bank sebagai mujir.

- Dewan Pengawas Syariah menilai bahwa aktivitas pembiayaan ulang (refinancing) syariah yang diterapkan di PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang Syariah, Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back, serta Fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Namun demikian, dalam mengabulkan permohonan restrukturisasi, BPRS harus bersikap ekstra hati-hati dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha nasabah. Selanjutnya, kualitas pembiayaan pasca restrukturisasi harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya dapat ditingkatkan menjadi lancar apabila tidak terjadi tunggakan selama tiga periode pembayaran berturut-turut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung dan deposan, ditemukan bahwa bank telah memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank, khususnya pada tabungan dengan akad wadiah. Selain itu, perhitungan dan persentase bagi hasil untuk tabungan dan deposito dengan prinsip mudharabah telah ditetapkan dalam akad dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh bank, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah, serta sejumlah SK Direksi, antara lain SK No. 084/MHY/DIR/SK/VII/2021 tentang Bonus Tabungan iB Harmoni, SK No. 20A/MHY/DIR/SK/III/2021 tentang Bonus TabunganKu, SK No. 47/MHY/DIR/SK/XI/2012 tentang Nisbah Tabungan Harmoni Ar Rafaa dan Biaya Pemeliharaan Rekening, serta SK No. 06/MHY/DIR/SK/I/2019 tentang Nisbah Deposito iB Harmoni.
- pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana persentase bagi hasilnya telah ditetapkan dalam akad berdasarkan hasil usaha bank dengan metode yang telah disepakati oleh bank, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah.
- pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non-halal lainnya telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Pendapatan tersebut digunakan untuk kegiatan sosial, yaitu qardul hasan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Selain itu, pencatatan dan laporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah juga telah dilaksanakan dengan baik. Dana-dana tersebut diterima dari pegawai bank, nasabah, dan masyarakat, dicatat dengan benar, dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT BPRS MHY per Desember 2024.

Kegiatan penghimpunan dana telah dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Sementara itu, kegiatan pembiayaan telah sesuai dengan berbagai fatwa DSN-MUI, di antaranya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik, No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back, serta No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. Selain itu, DPS juga menemukan bahwa perhitungan bagi hasil, pembayaran bagi hasil, profit margin, serta pedoman akuntansi yang mengacu pada PSAK dan PAPS telah dilakukan dengan mematuhi aturan yang berlaku, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Demiikian laporan pelaksanaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian operasional BPRS dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan BPRS ke depannya. Kami berharap, dengan adanya arahan dan petunjuk dari Allah SWT, kita senantiasa diberi kesehatan, perlindungan, dan kekuatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga langkah-langkah yang telah diambil akan terus mengarah pada pencapaian tujuan untuk menjadikan PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta sebagai Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang unggul, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan penuh keyakinan, kita optimis dapat terus berusaha dan berdoa agar cita-cita ini terwujud. Aamiin Yaa Rabbi! Aalamin.

Bilalah taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

YOGYAKARTA, 13 FEBRUARI 2025



DRS. ABDUL HALIM, M.HUM

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2024 DEWAN KOMISARIS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI W.B.



Tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menantang, khususnya bagi sektor jasa keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mengalami tekanan akibat perlambatan konsumsi rumah tangga serta gejolak ekonomi global. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi DIY tetap menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,03% (data BPS), didorong oleh sektor pengolahan, pendidikan, UMKM, pariwisata, serta perdagangan eceran.

Dinamika ini berpengaruh langsung terhadap kinerja lembaga keuangan termasuk BPRS, baik dari sisi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran pembiayaan, hingga pengelolaan risiko kredit. Dewan Komisaris memandang bahwa tantangan tersebut justru menjadi peluang strategis bagi BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui layanan perbankan yang inklusif, memberdayakan, dan berbasis syariah.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), Dewan Komisaris BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara aktif dan independen sepanjang tahun buku 2024. Pelaksanaan pengawasan tersebut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan bisnis bank secara sehat dan syariah, serta memastikan bahwa manajemen Perseroan bertindak secara profesional, transparan, dan akuntabel.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perakonomian Rakyat dan Bank Perakonomian Rakyat Syariah, yang mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota, Dewan Komisaris PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah menyelenggarakan rapat-rapat tersebut secara rutin sesuai ketentuan. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris membahas antara lain:

Rencana Bisnis Bank yang telah disusun oleh PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta

- Dewan Komisaris PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta turut berperan dalam proses penyusunan Rencana Bisnis Bank dengan memberikan berbagai pertimbangan dan saran kepada Direksi terkait target-target yang akan dicapai sepanjang tahun 2024. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi rencana bisnis yang telah ditetapkan, serta menyampaikan masukan konstruktif guna mendukung tercapainya target yang telah direncanakan.

Melakukan pembahasan terkait strategi PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta

- Dewan Komisaris dalam rapat membahas perihal strategi yang telah ditentukan oleh Direksi guna mencapai target di tahun 2024 diantaranya strategi penyaluran dana, penghimpunan dana, pemodalán, pengembangan dan pengadaan teknologi informasi serta membahas tentang strategi pengembangan SIM. Atas strategi – strategi tersebut Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasinya

Melakukan pembahasan terkait Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU PPT

- Dewan Komisaris melakukan evaluasi bersama unit Audit Internal serta unit Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) dengan meminta klarifikasi langsung dari pihak terkait. Dalam evaluasi tersebut, Dewan Komisaris secara aktif memberikan masukan dan rekomendasi guna mendorong Direksi membangun budaya sadar risiko dan kepatuhan di seluruh lingkungan kerja perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memantau pelaksanaan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, baik yang berasal dari audit internal maupun audit eksternal seperti GJK dan Auditor Independen.

Pengawasan Implementasi Budaya Sadar Risiko

- Dewan Komisaris BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta sepanjang tahun 2024 secara aktif mengawasi implementasi budaya sadar risiko melalui evaluasi rutin bersama Direksi dan unit terkait. Pengawasan difokuskan pada efektivitas manajemen risiko, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta tindak lanjut atas temuan audit. Dewan Komisaris juga mendorong penguatan pemahaman bahwa kesadaran risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh jenjang organisasi untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi yang didasarkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Aspek penilaian meliputi aspek operasional, keuangan dan aspek lainnya yang berkaitan erat bagi keberlanjutan kegiatan usaha Bank.



Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengelola operasional dan kinerja Bank dengan cukup baik. Sebagian besar target yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) berhasil dicapai, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan. Per 31 Desember 2024, total aset Bank meningkat sebesar Rp10.253.587 ribu dibandingkan posisi tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar Rp110.590.501 ribu atau mencapai 100,40% dari target RBB sebesar Rp110.154.827 ribu. Deviasi positif sebesar Rp435.674 ribu (0,40%) mencerminkan pertumbuhan aset yang sehat dan dikelola secara terkendali.

Dalam hal penyaluran dana, terdapat pertumbuhan pembiayaan sebesar Rp5.709.198 ribu menjadi Rp89.677.552 ribu. Namun demikian, pencapaian tersebut masih di bawah target sebesar Rp92.312.638 ribu atau hanya mencapai 97,15%, dengan deviasi negatif sebesar Rp2.635.086 ribu (-2,85%). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan perlu terus ditingkatkan. Meskipun jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) mengalami penurunan nominal sebesar Rp536.576 ribu menjadi Rp9.002.662 ribu, deviasi yang besar terhadap target (94%) mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan belum sepenuhnya sesuai harapan dan memerlukan penguatan strategi mitigasi risiko.

Dari sisi penghimpunan dana, tabungan menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp3.258.924 ribu, mencapai Rp30.949.120 ribu atau 103,49% dari target, dengan deviasi positif Rp1.043.832 ribu (3,49%). Kinerja ini mencerminkan keberhasilan strategi penghimpunan dana murah. Selain itu, dana pihak ketiga dalam bentuk deposito juga mengalami kenaikan sebesar Rp7.560.800 ribu menjadi Rp70.805.580 ribu, mencapai 100,68% dari target dengan deviasi positif Rp476.532 ribu (0,68%). Capaian ini mengindikasikan pengelolaan likuiditas yang baik dan peningkatan kepercayaan nasabah terhadap produk simpanan Bank.

Namun demikian, pendapatan operasional hanya meningkat sebesar Rp104.486 ribu, menjadi Rp15.059.583 ribu atau setara 60,06% dari target sebesar Rp24.910.486 ribu, dengan deviasi negatif sebesar Rp3.750.904 ribu (-19,94%). Capaian ini menunjukkan perlunya optimalisasi sumber pendapatan utama Bank. Dari sisi biaya, terdapat peningkatan sebesar Rp52.407 ribu menjadi Rp14.249.076 ribu, dengan pencapaian 84,91% dari target, yang mencerminkan adanya pengendalian biaya yang cukup baik. Namun efisiensi operasional secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung perolehan laba yang lebih optimal.

Laba-rugi sebelum pajak tercatat tumbuh tipis sebesar Rp52.080 ribu menjadi Rp810.507 ribu, namun hanya mencapai 39,95% dari target sebesar Rp2.029.031 ribu, dengan deviasi negatif sebesar Rp1.218.524 ribu (-60,05%). Margin laba yang belum optimal ini menjadi perhatian utama dan harus ditindaklanjuti dengan penguatan strategi profitabilitas. Laba-rugi setelah pajak justru mengalami penurunan sebesar Rp49.058 ribu menjadi Rp709.369 ribu, atau hanya mencapai 44,71% dari target Rp1.586.494 ribu. Deviasi negatif sebesar Rp577.124 ribu (-55,29%) menunjukkan adanya tekanan signifikan dari beban pajak dan komposisi biaya lainnya yang perlu dikendalikan secara lebih efektif.

Terkait posisi rekening administratif per 31 Desember 2024, nilai aset produktif yang telah dihapus buku tercatat sebesar Rp1.305.158 ribu, di mana yang telah berhasil ditagih sebesar Rp20.000 ribu. Dengan demikian, masih terdapat aset produktif yang belum tertagih sebesar Rp1.305.158 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah masih perlu ditingkatkan secara strategis dan terstruktur guna memperkuat kualitas aset Bank secara keseluruhan.

Kinerja keuangan BPRS pada aspek profitabilitas dan efisiensi menunjukkan tren penurunan yang perlu mendapat perhatian serius dari Dewan Komisaris. ROA menurun dari 0,78% menjadi 0,70% dengan deviasi negatif sebesar -0,08%, dan realisasi hanya mencapai 1,64% dari target 38%, mengindikasikan rendahnya efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba atas aset yang dimiliki. Penurunan ROE dari 10,90% menjadi 10,19% atau sebesar -0,70%, serta capaian hanya 52,26% dari target 19,50%, juga menunjukkan kurang optimalnya pemanfaatan modal dalam menciptakan nilai bagi pemilik dana. Selain itu, rasio efisiensi (BOPO) meningkat dari 90,61% menjadi 92,84% atau deviasi negatif sebesar -1,73% dari target 89,35%, mengemirkan meningkatnya beban operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan. Atas dasar ini, Dewan Komisaris perlu mendorong manajemen untuk mengevaluasi strategi pengelolaan aset, meningkatkan kualitas pembiayaan produktif, serta mengoptimalkan beban operasional guna memperbaiki profitabilitas dan efisiensi secara keseluruhan.

FDR (Financing to Deposit Ratio) mengalami kenaikan dari 91,77% menjadi 108,94%, atau naik sebesar 17,17%. Realisasi akhir mencapai 118,38% dari target, menunjukkan deviasi positif 16,85%. Dari sudut pandang pengawasan, peningkatan ini mengindikasikan agresivitas dalam penyaluran pembiayaan yang melebihi kemampuan penghimpunan dana. Meskipun pertumbuhan pembiayaan patut diapresiasi, Dewan Komisaris perlu memastikan bahwa peningkatan ini tetap diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang baik dan likuiditas yang terjaga agar tidak menimbulkan risiko likuiditas.

CAR (Capital Adequacy Ratio) mengalami penurunan tipis dari 17,16% menjadi 16,58%, namun tetap berada pada level aman dan sehat. Target CAR sebesar 11,03% berhasil terdampai dengan deviasi positif sebesar 2,52%. Meskipun terjadi sedikit penurunan, posisi CAR masih menunjukkan bahwa permodalan BPRS dalam kondisi baik dan mampu menyerap potensi risiko. Dewan Komisaris tetap perlu memastikan bahwa pertumbuhan pembiayaan tetap dalam batas wajar agar tidak menggerus rasio permodalan secara signifikan.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI DIREKSI

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya ikut memberikan masukan kepada Direksi agar dapat menjalankan strategi perusahaan yang sebelumnya telah ditentukan pada rencana bisnis bank, sehingga apa yang menjadi target dapat tercapai optimal dengan memanfaatkan peluang dan prospek usaha industri perbankan maupun bidang usaha pendukung lainnya. Secara berkala, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom), dengan agenda menyampaikan evaluasi hasil kinerja Bank. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris senantiasa ditingkatkan dengan menjaga komunikasi baik secara formal maupun informal dengan Direksi dan karyawan sehingga pengawasan terhadap aspek perbankan dapat berjalan baik dan sesuai dengan rencana bisnis bank.

Pencapaian target RBB secara keseluruhan cukup baik, beberapa komponen keuangan ada yang realisasinya dibawah target namun pada pos – pos keuangan utama sebagian besar dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan. Kendala yang dihadapi selama tahun 2024 yaitu masih adanya beban penyelesaian permasalahan masa lalu sehingga kinerja keuangan masih mengalami kerugian sampai dengan akhir periode 2024. Hal ini sedikit berimbas pada tingkat kepercayaan dari masyarakat terutama di kalangan masyarakat yang rasional. Namun demikian kendala yang ada dapat dilalui dengan baik sehingga realisasi rencana bisnis Tahun 2024 dapat dicapai dengan cukup baik.

Secara umum kebijakan & strategi manajemen dalam rencana bisnis mengacu pada pencapaian sasaran jangka pendek dan beberapa penyesuaian yang dipandang perlu untuk mengantisipasi perkembangan kondisi yang ada, yaitu:

- Meningkatkan Pertumbuhan Aset Bank
- Meningkatkan tingkat pertumbuhan pembiayaan dari sektor pembiayaan mikro sekaligus melakukan diversifikasi produk fix income;
- Perbaiki pengelolaan pembiayaan bermasalah / menurunkan Rasio NPF;
- Melengkapi susunan pengurus dan perubahan struktur organisasi yang mengakomodir pengembangan bisnis dan layanan perbaikan kepatuhan dan manajemen risiko, implementasi budaya kerja dan peningkatan kualitas pembiayaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) yang profesional seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah;
- Pelaksanaan data cleansing serta pengkinian data untuk semua rekening dana dan pembiayaan;
- Meningkatkan kecepatan proses kerja dengan mengganti Core Banking System (CBS);
- Peningkatan permodalan yaitu peningkatan modal ditempatkan agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat mendukung percepatan perbaikan kinerja perusahaan.

Sedangkan kebijakan & strategi manajemen dalam rencana jangka menengah yaitu menjaga aspek permodalan agar sesuai ketentuan sehingga tidak menghambat proses percepatan kinerja bank sehingga CAR tetap terjaga seiring dengan pertumbuhan bisnis bank. Hal ini telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan hal ini tercermin dari kondisi permodalan sampai dengan Desember 2024 tercatat cukup baik.

Selain itu sehubungan dengan situasi lingkungan eksternal maupun internal perbankan yang mengalami perkembangan cukup pesat di tahun ini, sehingga secara otomatis akan diikuti pula dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha BPRS. Adanya risiko akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), oleh karena itu bank akan memperkuat fungsi manajemen risiko serta kepatuhan dengan cara melengkapi struktur organisasi baik di level Pengurus, Pejabat Eksekutif maupun Staf/Karyawan. Dengan kelengkapan struktur organisasi diharapkan akan semakin meningkatkan pengawasan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko.



Gambar : Pelaksanaan Rapat Dekam & Direksi Serta Evaluasi Kinerja

PANDANGAN ATAS MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN, DAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan operasional PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa memperhatikan aspek risiko dan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap kegiatan dipantau kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis dan praktik terbaik serta melakukan antisipasi terhadap risiko yang bisa saja timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank.

Selama tahun 2024 PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta belum sepenuhnya melakukan pemenuhan dan penyempurnaan struktur organisasi perusahaan, serta pemenuhan kelengkapan pengurus. Selain itu, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab atas Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU PPT. Bank juga telah mengangkat anggota Komisaris, sehingga jumlah pengurus telah lengkap sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya melalui POJK nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Dan aspek manajemen risiko dan penerapan tata kelola, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah melakukan self-assessment secara periodik dan menyampaikan pelaporannya kepada OJK secara daring melalui aplikasi pelaporan online OJK.

PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta melakukan penilaian sendiri / self assesment penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan POJK nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah pada pasal 102 dimana BPR dan BPRS wajib menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku yang paling sedikit memuat :

- Ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR dan BPR Syariah;
- Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi;
- Kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris;
- Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
- Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah;
- Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah;
- Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
- Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, baik nominal maupun penerima dana;

Dari hasil self assesment yang dilakukan pada periode 31 Desember 2024, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mendapat nilai komposit "2" atau kategori "Baik". Manajemen BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan namun tetap memerlukan perhatian dari manajemen BPRS dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Struktur dan infrastruktur pada BPR Syariah telah menunjukkan kondisi yang baik secara keseluruhan. Aspek-aspek penting seperti Aspek Pemegang Saham, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Ekstern, Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, serta Rencana Bisnis BPR dinilai telah terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan bahwa BPR Syariah memiliki fondasi struktural dan infrastruktur yang memadai untuk menunjang pelaksanaan fungsi tata kelola yang efektif.
- Proses penerapan tata kelola di BPR Syariah secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dengan sebagian besar aspek berada pada kategori memadai hingga sangat memadai. Proses tata kelola pada Aspek Pemegang Saham, Penanganan Benturan Kepentingan, Fungsi Audit intern dan Ekstern, serta Rencana Bisnis dinilai sangat memadai, mencerminkan pengelolaan yang kuat dan patuh terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sementara itu, aspek lainnya seperti Pelaksanaan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, Batas Maksimum Pemberian Kredit, serta Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berada dalam kategori memadai. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa BPR Syariah memiliki proses penerapan tata kelola yang cukup kokoh untuk mendukung keberlangsungan dan integritas operasionalnya.

- penerapan tata kelola yang dilakukan BPR Syariah menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan sebagian besar indikator berada dalam kategori memadai hingga sangat memadai. Aspek-aspek seperti Pelaksanaan Tugas Direksi, Penanganan Benturan Kepentingan, Fungsi Audit Ekstern, Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan Rencana Bisnis memperoleh penilaian sangat memadai, mencerminkan keberhasilan implementasi prinsip tata kelola dalam praktik operasional. Sementara itu, aspek lainnya seperti Aspek Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Manajemen Risiko, dan Sistem Pelaporan Teknologi Informasi dinilai memadai. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penerapan tata kelola di BPR Syariah telah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja lembaga yang sehat dan berkelanjutan.
- Namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Syariah, khususnya terkait pemenuhan anggota Dewan Pengawas Syariah. Struktur dan infrastruktur pada aspek tersebut dinilai tidak terpenuhi sebagian yang mencerminkan adanya kekurangan dalam pemenuhan sumber daya manusia, pembentukan satuan kerja, serta penyusunan kebijakan remunerasi dan nominasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam memperkuat fondasi kelembagaan agar dapat mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah secara optimal sesuai ketentuan regulasi.

Terkait aspek Kepatuhan, hingga akhir periode pelaporan pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen BPR Syariah telah menyusun dan menetapkan sejumlah kebijakan strategis sebagai bentuk implementasi prinsip tata kelola yang baik serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya meliputi kebijakan-kebijakan berikut:

- Pembentukan Unit Kerja Deskcoll & Penetapan SOP Deskcoll
- Batas Kapitalisasi Aset Tetap & Inventaris
- Pengkinian Batas Wewenang Memutus Pembiayaan
- Ketentuan Review Berkas Pembiayaan Sebelum Komite
- Ketentuan Jenis Agunan, Batasan Akad dan Pengikatannya, Sekali akad Pembiayaan Kepada Pihak Terkait, dan Monitoring Agunan
- Pemberlakuan Pedoman Penerapan SAF, Penunjukan Tim SAF, dan Pengelolaan Whistleblowing System.

Sementara, dalam aspek manajemen risiko, hasil penilaian self assessment terhadap profil risiko PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta per posisi 31 Desember 2024 menunjukkan profil risiko BPRS berada pada peringkat 3 (sedang), yang mengindikasikan bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dijalankan, potensi kerugian yang mungkin dihadapi berada pada tingkat sedang dalam periode waktu tertentu di masa mendatang. Sementara itu, kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) dinilai cukup memadai, meskipun telah memenuhi prasyarat minimum, namun masih terdapat sejumlah kelemahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari manajemen untuk dilakukan perbaikan guna menjaga efektivitas pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan		Tingkat Risiko
	Risiko Intern	KPMR	
Risiko Kredit	3	3	3
Risiko Operasional	2	2	2
Risiko Kepatuhan	3	3	3
Risiko Likuiditas	2	3	3
Peringkat Risiko			3

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Melalui rapat evaluasi bersama unit Audit Internal serta unit Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi guna memperkuat budaya sadar risiko dan kepatuhan di seluruh lingkungan kerja PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta. Secara keseluruhan, hasil penilaian atas penerapan tata kelola menunjukkan kondisi yang cukup memadai hingga sangat memadai pada sebagian besar aspek, baik dari sisi struktur, proses, maupun hasil penerapan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Sementara itu, profil risiko BPRS berada pada peringkat 3 (sedang), dengan tingkat risiko intern tergolong sedang dan kualitas penerapan manajemen risiko yang cukup memadai, meskipun masih memerlukan perhatian manajemen untuk menyempurnakan pengendalian risiko ke depan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas partisipasinya dalam pelaksanaan audit serta kontribusinya melalui saran-saran yang konstruktif kepada manajemen. Sebagai informasi, berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun 2024, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan.

PENUTUP

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kualitas. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direksi dan sumber daya insani PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta yang telah bekerja dengan maksimal sepanjang tahun 2024. Setelah mencapai kinerja yang luar biasa pada tahun 2023, Dewan Komisaris mendorong direksi untuk terus berinovasi. Alhamdulillah, kinerja BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi nasional dan regional.

Setelah mengalami pemulihan pada tahun 2023, setelah tiga tahun sebelumnya (2020 - 2023) tertekan akibat pandemi Covid-19, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berhasil mempertahankan pertumbuhannya secara berkelanjutan sepanjang 2024. Dewan Komisaris berharap direksi terus meningkatkan kinerja, melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh portofolio untuk menentukan langkah dan strategi mitigasi yang tepat.

Sebagai bank syariah, kami terus mengingatkan manajemen untuk selalu konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di setiap aspek operasional. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya komitmen dari seluruh manajemen untuk terus mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kami percaya bahwa dengan konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip syariah dan GCG, budaya di BPRS HIK Pajahyangan akan semakin kuat dan unggul, yang menjadi modal utama dalam menjalankan operasional. Oleh karena itu, kami yakin Idesja HIK Pajahyangan pada tahun 2024 akan terus mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Terima kasih atas rasa hormat, Atas nama Dewan Komisaris, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, debitur, dan mitra kerja PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta. Semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran di PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta untuk terus memberikan yang terbaik di tahun 2025, sehingga dapat meraih kinerja yang lebih baik lagi dan mewujudkan visi "Terwujudnya Bank Syariah yang menjadi mitra aman dan amanah."

*Bilahi taufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh*

YOGYAKARTA, 30 APRIL 2025



ROHADI. SH

KOMISARIS UTAMA



JUANDA. SE

KOMISARIS

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2024 DIREKSI



*BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI W.B.*

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta dapat melalui tahun 2024 dengan penuh semangat dan keteguhan dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Semoga pada tahun-tahun mendatang, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa mampu mencatatkan kinerja yang semakin baik dan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat.

PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta dapat melalui tahun 2024 dengan penuh optimisme dan pencapaian yang menggembirakan, meskipun di tengah dinamika perekonomian nasional maupun regional yang penuh tantangan. Dalam perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sendiri mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03 % berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sedikit melambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07 %. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya resiliensi ekonomi daerah, dengan kontribusi signifikan dari Lapangan Usaha Perdagangan Listrik dan Gas serta peningkatan pengeluaran oleh Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK LNPRT).

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun ini masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi & Makan, Minum, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang secara kolektif menjadi landasan penting bagi kestabilan ekonomi daerah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 61,86 %.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional tersebut, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berhasil menjaga dan meningkatkan kinerja usaha secara selaras (*inline*), dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian, inovasi layanan berbasis digital, serta penguatan pembiayaan sektor-sektor produktif yang mendukung struktur ekonomi daerah. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan perusahaan, serta dukungan berkelanjutan dari para nasabah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun demikian, kami menyadari bahwa tantangan masih terus hadir, termasuk dalam hal penyelesaian aset-aset bermasalah historis dan pemenuhan rasio kehati-hatian yang menjadi perhatian Gtortas Jasa Keuangan. Direksi berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dan bertahap dalam pemulihan kualitas aset serta membangun sistem manajemen risiko yang lebih adaptif. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha.

KINERJA PERUSAHAAN

PENYALUARAN PEMBIAYAAN

Dari sisi intermediasi, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mencatat kinerja positif dalam penyaluran pembiayaan. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp89.677.551 ribu kepada 1.543 nasabah, meningkat sebesar Rp5.709.198 ribu atau tumbuh 6,80% dibandingkan posisi tahun 2023 yang sebesar Rp83.968.354 ribu kepada 1.657 nasabah. Meskipun terdapat penurunan jumlah nasabah pembiayaan, dari sisi nilai tetap menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan terkendali. Kinerja ini menunjukkan komitmen bank untuk tetap mendorong fungsi intermediasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kualitas pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran pembiayaan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas aset dan keberlanjutan usaha nasabah.

Realisasi pembiayaan tersebut mencapai 97,15% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024 sebesar Rp92.312.638 ribu. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target nominal, pencapaian ini tetap patut diapresiasi mengingat bank mampu mempertahankan tren pertumbuhan positif di tengah tantangan perekonomian dan pasar yang dinamis. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif untuk menjaga kualitas aset dan menekan risiko pemburukan portofolio.

POS	2023	2024	Pertumbuhan		RBB 2024	Realisasi
	(audited)	(audited)	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan Yang Disalurkan:						
- Ijarah & IMBT	23.148.701	30.596.896	9.448.195	44,7%	20.676.168	148,0%
- Pinang Murabahah	50.067.858	42.976.338	-7.091.520	-14,0%	63.480.221	67,7%
- Pembiayaan Mudharabah	10.040.075	11.014.000	973.925	9,7%	7.943.025	138,7%
- Pembiayaan Musyarakah	2.050.000	4.102.991	2.052.991	100,0%	0	100,0%
- Muftah	114.910	56.512	-58.398	-51,7%	213.232	36,5%
- Pinang Sewa	544.790	938.816	394.026	70,9%	0	100,0%

Secara rinci, pertumbuhan pembiayaan didukung secara signifikan oleh peningkatan pembiayaan dengan akad Ijarah & IMBT yang naik dari Rp21.148.701 ribu pada tahun 2023 menjadi Rp30.596.896 ribu di tahun 2024, atau tumbuh sebesar 44,7%. Pembiayaan Mudharabah juga mengalami kenaikan sebesar 9,7% menjadi Rp11.014.000 ribu. Sementara itu, pembiayaan dengan akad Musyarakah tumbuh tipis sebesar 0,2% menjadi Rp2.050.000 ribu. Sebaliknya, Pinang Murabahah mengalami penurunan sebesar Rp7.091.520 ribu atau -14,0%, menjadi Rp42.976.338 ribu dari posisi sebelumnya Rp50.067.858 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian strategi bank untuk lebih fokus pada portofolio yang memiliki risiko terkendali dan potensi keberlanjutan yang lebih tinggi.



Terkait rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance atau NPF), BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berhasil menurunkan dari 11,36% pada akhir tahun 2023 menjadi 10,04% pada akhir tahun 2024, atau turun sebesar 1,32%. Bahkan, rasio tersebut tercatat jauh di bawah target NPF tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 5,02%, dengan tingkat pencapaian 199,86%. Penurunan NPF ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menerapkan kebijakan mitigasi risiko dan peningkatan kualitas monitoring terhadap pembiayaan bermasalah.

Meskipun secara nominal belum mencapai target yang ditetapkan, capaian pembiayaan tahun 2024 ini merupakan hasil dari pendekatan strategis manajemen yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan angka semata, tetapi juga memperhatikan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Pendekatan ini penting dalam menjaga keberlangsungan kinerja bank yang sehat dan berkelanjutan. Dengan strategi yang adaptif, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta tetap berada di jalur pertumbuhan positif dan siap memperluas pembiayaan pada sektor-sektor prioritas termasuk UMKM, sektor produktif, dan mitra strategis lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

PENGHIMPUNAN DANA

Selama tahun 2024, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menunjukkan kinerja positif dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan lembaga keuangan. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp102.215.578 ribu, tumbuh sebesar Rp9.748.180 ribu atau meningkat 10,5% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp92.467.398 ribu. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024 sebesar Rp100.701.063 ribu, dengan tingkat realisasi sebesar 101,5%. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam menyimpan dan mengelola dana mereka.

POS	2023 (audited)	2024 (audited)	Pertumbuhan Rp	%	RBB 2024 Rp	Realisasi %
Dana Yang Dihimpun :						
- Tabungan Wadiah	12.484.736	12.478.294	-6.442	-0,05%	13.468.012	92,7%
- Tabungan Mudharabah	14.854.353	18.292.308	3.438.035	23,1%	16.451.125	111,2%
- Deposito Mudharabah	44.744.700	50.905.580	6.160.880	13,8%	51.243.037	99,3%
- Simpanan dari Bank Lain	18.651.107	20.070.448	1.427.340	7,7%	19.086.011	105,2%
- Pinjaman Mudharabah	1.332.421	460.878	-1.071.544	-80,4%	460.878	100,0%

Pertumbuhan penghimpunan dana terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada Tabungan Mudharabah yang naik sebesar Rp3.438.035 ribu atau 23,1% dan Deposito Mudharabah yang tumbuh sebesar Rp6.160.880 ribu atau 13,8%. Selain itu, Simpanan dari Bank Lain juga mencatat kenaikan sebesar Rp1.427.340 ribu atau 7,7%. Kenaikan ini menunjukkan strategi penghimpunan dana yang efektif melalui diversifikasi produk simpanan dan peningkatan layanan kepada nasabah institusional maupun ritel.

Namun demikian, terdapat penurunan pada dua komponen, yaitu Tabungan Wadiah yang turun sebesar Rp206.452 ribu atau -1,6%, dan Pinjaman Mudharabah yang mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1.071.544 ribu atau -69,9%. Meskipun demikian, penurunan ini tidak mempengaruhi keseluruhan kinerja yang tetap positif. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan dana yang lebih selektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang, dengan tetap menjaga likuiditas dan struktur kewajiban yang sehat.

Secara keseluruhan, capaian pengumpulan dana selama tahun 2024 menunjukkan pengelolaan dana pihak ketiga yang sehat, efisien, dan terarah. Pertumbuhan dana yang konsisten disertai pencapaian di atas target RBB menjadi modal penting dalam mendukung ekspansi pembiayaan dan penguatan struktur keuangan bank. Ke depan, pengembangan produk simpanan yang kompetitif dan edukasi berkelanjutan kepada nasabah diharapkan dapat menjaga tren pertumbuhan positif ini serta meningkatkan inklusi keuangan syaria di wilayah layanan BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta.

PENDAPATAN, BIAYA, DAN LABA PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2024, kinerja pendapatan usaha PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang moderat. Total pendapatan usaha yang dibukukan sebesar Rp14.851.239 ribu atau tumbuh sebesar Rp54.157 ribu (0,4%) dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar Rp14.797.082 ribu. Meskipun terdapat pertumbuhan, realisasi pendapatan ini masih berada di bawah target Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024 sebesar Rp18.765.824 ribu, dengan pencapaian sebesar 79,1%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren pendapatan tetap positif, beberapa komponen belum mencapai kinerja optimal sesuai rencana tahunan.

ACCOUNT NAME	2023 (audited)	2024 (audited)	Pertumbuhan Rp	%	RBB 2024 Rp	Realisasi %
Pendapatan Usaha						
Pendapatan Bagi Hasil & Margin	12.765.164	13.010.637	245.474	1,9%	17.066.433	76,2%
Pendapatan Administrasi	1.152.953	1.094.936	-58.017	-5,0%	1.297.440	84,4%
Pendapatan Operasional Lainnya	878.965	745.665	-133.300	-15,2%	401.951	185,5%
Jumlah Pendapatan Usaha	14.797.082	14.851.239	54.157	0,4%	18.765.824	79,1%
Belanja Bagi Hasil & Bonus	6.806.330	6.897.231	90.901	1,3%	7.429.362	92,8%

Komponen terbesar penyumbang pendapatan adalah Pendapatan Bagi Hasil & Margin yang meningkat sebesar Rp245.474 ribu atau 1,9% dari tahun sebelumnya. Namun, realisasi komponen ini hanya mencapai 76,2% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp17.066.433 ribu. Hal ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam penyaluran pembiayaan produktif dan optimalisasi margin selama tahun berjalan, sehingga mempengaruhi pencapaian terhadap target pendapatan inti bank.

Sementara itu, Pendapatan Administrasi mengalami penurunan sebesar Rp58.017 ribu atau -5,0% dari tahun 2023, dengan realisasi 84,4% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh kebijakan insentif yang lebih ringan kepada nasabah atau penyediaan tarif layanan untuk menjaga daya saing. Di sisi lain, Pendapatan Operasional Lainnya justru turun cukup signifikan sebesar Rp133.300 ribu atau -15,2%, meskipun berhasil melampaui target RBB secara signifikan dengan pencapaian 185,5%. Pencapaian ini menunjukkan adanya sumber pendapatan tambahan di luar pendapatan utama yang berkontribusi positif bagi bank.

Dari Beban Bagi Hasil & Bonus, tercatat sebesar Rp6.897.251 ribu atau naik sebesar Rp87.923 ribu atau 1,3% dibandingkan tahun 2023. Beban ini masih terkendali dan menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan dana pihak ketiga meskipun dana yang dihipunkan meningkat. Realisasi beban ini sebesar 92,8% dari target yang ditetapkan, yang berarti bank berhasil menjaga struktur biaya dalam batas wajar dan tetap memberikan imbal hasil yang kompetitif kepada nasabah.

Secara keseluruhan, Direksi menilai bahwa meskipun target pendapatan belum sepenuhnya tercapai, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berhasil mempertahankan pertumbuhan yang positif dan menjaga stabilitas pendapatan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi. Pencapaian ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi strategi penyaluran pembiayaan dan pengembangan produk, agar di tahun-tahun mendatang pendapatan usaha dapat tumbuh lebih agresif dan selaras dengan target bisnis yang telah ditetapkan.

ACCOUNT NAME	2023	2024	Pertumbuhan		RBB 2024	Realisasi
	(audited)	(audited)	Rp	%	Rp	%
Beban Usaha						
Umum dan Administrasi	1.729.371	2.088.368	358.997	20,8%	2.577.450	81,0%
Gaji dan Tunjangan + Pendidikan	4.488.144	4.707.244	219.100	5,4%	5.329.004	87,5%
Penyisihan Penghapusan Pembayar	919.126	234.672	-644.454	-70,1%	1.042.850	26,3%
Penyusutan Aktiva Tetap	248.360	253.753	5.392	2,2%	304.591	83,3%
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Non Operasional	158.016	208.345	50.329	31,9%	44.862	46,5%
Biaya non Operasional	22.339	27.786	5.449	24,4%	48.000	57,9%
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	758.427	810.507	52.080	6,9%	2.028.029	39,9%
Penghasilan/Beban Pajak	-	101.138	101.138	100,0%	442.537	22,9%
LABA/RUGI SETELAH PAJAK	758.427	709.369	-49.058	-6,5%	1.585.492	44,7%

Sedangkan beban usaha PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menunjukkan peningkatan di beberapa komponen utama. Beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp2.088.368 ribu, naik sebesar Rp358.997 ribu atau 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan aktivitas operasional, namun realisasi beban ini masih berada pada 81,0% dari target RBB 2024, yang mengindikasikan adanya efisiensi dalam pengeluaran administrasi secara keseluruhan.

Beban gaji, tunjangan, dan pendidikan karyawan meningkat sebesar Rp239.100 ribu atau tumbuh 5,4% dibanding tahun 2023, dengan total realisasi sebesar Rp4.707.244 ribu atau 87,5% dari target. Kemungkinan ini relatif moderat dan mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemberian kompensasi yang layak, meskipun terdapat efisiensi terhadap rencana bisnis tahunan.

Salah satu aspek paling signifikan adalah penurunan drastis pada penyisihan penghapusan pembiayaan, dari Rp919.126 ribu di tahun 2023 menjadi hanya Rp274.672 ribu di tahun 2024 atau turun 70,1%. Penurunan ini mencerminkan peningkatan kualitas pembiayaan yang signifikan dan membaiknya manajemen risiko pembiayaan. Namun demikian, realisasi penyisihan ini hanya mencapai 26,3% dari target, yang juga menunjukkan konservatisme dalam estimasi kerugian pembiayaan bermasalah.

Dari sisi pendapatan dan beban non-operasional, terdapat peningkatan pendapatan non-operasional sebesar Rp50.329 ribu (31,9%), sementara biaya non-operasional juga naik Rp5.449 ribu (24,4%). Kemungkinan pendapatan non-operasional yang melampaui target RBB (466,5%) memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan, meskipun secara total belum mampu menutup peningkatan beban operasional.

Labas sebelum pajak pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp810.507 ribu, meningkat sebesar Rp52.080 ribu atau 6,9% dari tahun sebelumnya. Namun setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar Rp101.138 ribu, laba bersih setelah pajak justru turun sebesar Rp49.058 ribu (-6,5%) dibanding tahun 2023. Realisasi laba bersih ini hanya mencapai 44,7% dari target RBB yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi efisiensi di beberapa pos biaya dan peningkatan laba operasional, beban pajak yang lebih tinggi serta keteridaktercapaian pendapatan secara keseluruhan berdampak pada penurunan laba bersih. Direksi mencermati bahwa tantangan efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan tetap menjadi prioritas utama dalam strategi keuangan tahun mendatang.



STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN



Sebagai lembaga keuangan yang terus berkembang, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menyadari bahwa keberhasilan strategi bisnis tidak hanya ditentukan oleh pencapaian kinerja usaha, tetapi juga oleh kekuatan leadership, perencanaan (planning) yang matang, serta aksi nyata (action) yang konsisten. Oleh karena itu, strategi yang kami terapkan dibangun di atas fondasi kepemimpinan yang visioner, kerja sama tim (teamwork) yang solid, serta pemanfaatan gagasan (ideas) dan inovasi (innovation) yang relevan dengan perkembangan zaman.

Setiap langkah strategis yang diambil diarahkan untuk memperkuat struktur organisasi, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas portofolio bisnis perusahaan. Di sisi lain, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip regulasi dan nilai-nilai keberlanjutan tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan aktivitas usaha kami.

Dengan mengedepankan kolaborasi lintas fungsi, keterbukaan terhadap ide-ide baru, serta pengambilan keputusan yang berbasis data dan risiko yang terukur, kami percaya bahwa perusahaan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Inovasi menjadi ruh dalam setiap proses bisnis yang kami jalankan, baik dalam pelayanan nasabah, pengembangan produk, maupun penguatan sistem internal perusahaan.

Melalui kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan eksternal, perusahaan juga terus mendorong terciptanya budaya kerja yang sinergis dan produktif. Kami percaya bahwa strategi yang dilandasi oleh kerja tim dan eksekusi yang tepat akan mendorong keberhasilan jangka panjang. Dengan semangat transformasi dan keberlanjutan, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan tata kelola yang baik.

KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam rencana bisnis disusun secara terintegrasi dan komprehensif dengan mengacu pada arah pencapaian tujuan strategis jangka pendek PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta. Penyusunan ini mempertimbangkan kondisi internal perusahaan, dinamika pasar, regulasi yang berlaku, serta peluang dan tantangan yang ada di sektor perbankan syariah. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan menetapkan sasaran-sasaran jangka pendek yang menjadi fokus utama untuk mendorong kinerja yang berkelanjutan, memperkuat daya saing, serta memperluas kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun sasaran jangka pendek yang dimaksud antara lain meliputi:

- **Strategi Penghimpunan Dana Murah**

Dalam rangka menggerjot penghimpunan dana murah, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta memprioritaskan pengembangan produk tabungan dan deposito yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk unggulan seperti Tabungan Harmoni Plus, Tabungan Ukhawah, Tabungan Anafa, serta SimPel (Simpanan Pelajar) menjadi ujung tombak dalam strategi ini. Promosi dilakukan secara intensif dan menyeluruh melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media cetak, elektronik, digital, serta media luar ruang seperti brosur, iklan radio, videotron, dan podcast, untuk meningkatkan awareness dan menarik minat calon nasabah.

Strategi jemput bola yang menjadi ciri khas pelayanan BPRS tetap dipertahankan dan ditingkatkan guna membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas juga diperkuat untuk menjangkau segmen-segmen produktif yang telah menunjukkan pemulihan pasca pandemi, seperti pelaku usaha perdagangan dan jasa. Untuk menjaga daya saing produk deposito, evaluasi nisbah dilakukan secara berkala agar tetap kompetitif di tengah dinamika pasar. Kombinasi strategi promosi yang modern dan pendekatan personal ini diharapkan mampu meningkatkan volume dana pihak ketiga secara berkelanjutan.

Selain itu, BPRS membentuk tim data dan riset yang bertugas menghimpun data pelaku usaha dan komunitas potensial secara sistematis (by name, by address, by phone). Data ini akan menjadi acuan dalam kegiatan prospecting, promosi, dan pengembangan layanan ke depan. Grup media sosial dengan jangkauan lebih dari 18.000 orang juga dikelola untuk memperluas penetrasi pasar. Selain itu, BPRS terus menjaga efisiensi biaya, meningkatkan laba, dan memperkuat struktur permodalan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

- **Strategi Penyaluran Pembiayaan Berkualitas**

Strategi penyaluran pembiayaan BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti UMKM dan perdagangan, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui akad murabahah, ijarah, dan musyarakah. Dalam rangka menjaga kualitas portofolio pembiayaan, dilakukan penguatan pada proses analisis kelayakan nasabah melalui pemetaan risiko yang ketat dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada pelaku usaha yang memiliki prospek usaha yang sehat dan mampu mengelola kewajibannya secara tepat waktu.

Selain itu, skema pembiayaan berbasis komunitas atau group lending diterapkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif antaranggota dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Pendampingan kepada nasabah juga menjadi bagian integral dalam strategi ini, di mana BPRS secara berkala memberikan edukasi mengenai pengelolaan usaha, konsultasi manajemen keuangan, serta bimbingan teknis lainnya yang relevan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha nasabah sekaligus menjaga kualitas aset pembiayaan secara berkelanjutan.

- **Strategi Pengembangan Teknologi Informasi**

Strategi pengembangan teknologi informasi di BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta diarahkan pada optimalisasi layanan digital guna meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses nasabah terhadap produk dan layanan perbankan. Pengembangan aplikasi mobile menjadi prioritas utama untuk memfasilitasi transaksi nasabah secara mandiri, praktis, dan aman. Selain itu, pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp Blast dan media online lainnya dimaksimalkan sebagai sarana promosi yang efisien dan menjangkau lebih banyak calon nasabah secara langsung.

Di sisi lain, penguatan sistem monitoring portofolio pembiayaan dilakukan dengan menggunakan dashboard digital berbasis real-time. Teknologi ini memungkinkan tim manajemen dan pembiayaan untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap performa portofolio, sekaligus mendeteksi secara dini potensi risiko penurunan kualitas aset. Pendekatan berbasis data ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

- **Strategi Penguatan Tata Kelola**

Penguatan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) menjadi fokus utama BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta untuk menjaga keberlanjutan usaha serta membangun kepercayaan publik. BPRS berkomitmen untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat, terbuka, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, sambil tetap mematuhi aturan mengenai kerahasiaan bank. Penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi diintegrasikan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan terpercaya.

Selain itu, BPRS juga menerapkan manajemen risiko yang efektif dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan dengan baik. Untuk menjaga kualitas kinerja keuangan, target kesehatan bank ditetapkan agar selalu berada pada peringkat komposit minimal 2, dengan penilaian yang baik pada aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan yang kuat dan berkelanjutan, serta menjaga integritas dan reputasi bank di mata masyarakat.

- **Strategi Kolaborasi Dengan Komunitas**

BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mengembangkan strategi kolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menjadikan bank sebagai bagian integral dari ekosistem sosial-ekonomi di Yogyakarta. Kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial dilakukan melalui pengajian, kegiatan sosial, serta program kerja sama strategis lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan, serta memperluas jangkauan produk dan layanan bank. Selain itu, tim pemasaran juga aktif mendata dan membina komunitas-komunitas potensial sebagai target perluasan produk dan layanan bank.

Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi kemitraan dengan komunitas masjid dan pesantren untuk mengelola dana wakaf, zakat, dan infaq, serta program inklusi keuangan syariah yang memberikan edukasi literasi keuangan di sekolah, pesantren, dan komunitas UMKM. BPRS juga menjalin sinergi dengan BUMDes dan koperasi untuk mendukung pembiayaan produktif berbasis desa dan ekonomi lokal. Melalui strategi Community-Based Marketing, BPRS melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas sebagai mitra dalam memperluas jangkauan promosi, sekaligus meningkatkan loyalitas nasabah.

- **Strategi Peningkatan Kualitas Layanan**

Strategi optimalisasi layanan BPRS bertujuan untuk memberikan pengalaman nasabah yang unggul dan berkesan. Penerapan prinsip *Service Excellence* dengan pelatihan intensif untuk frontliner dan peningkatan standar pelayanan yang mengutamakan prinsip 3S (Senyum, Salam, Sapa) menjadi fokus utama. Selain itu, BPRS memperluas kanal layanan dengan menambah layanan kas keliling, mini branch di pasar, dan agen laku pandai syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Digitalisasi layanan juga diperkuat melalui penyediaan chatbot, WhatsApp Business, dan live chat untuk memberikan interaksi yang cepat dan efisien. Sistem pengaduan nasabah diperkuat dengan adanya mekanisme responsif berbasis SLA (*Service Level Agreement*) dan *feedback loop* untuk terus melakukan perbaikan.

Layanan kepada masyarakat diperkuat melalui mobil kas keliling yang fleksibel dan cepat memberikan akses yang lebih mudah bagi nasabah. Oleh BPRS sebagai bank yang dekat dengan masyarakat, terutama melalui pelayanan yang ramah dan empatik, terus dibangun dengan mengedepankan kearifan lokal. Prioritas utama dalam pelayanan adalah menyederhanakan proses agar mudah, cepat, dan andal, dengan tujuan meningkatkan loyalitas nasabah, terutama nasabah prima. Selain itu, BPRS juga melakukan review dan pemantauan secara berkala terhadap kebutuhan nasabah untuk memastikan kualitas layanan yang sesuai dengan harapan mereka.

- **Strategi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Insani**

Strategi penguatan Sumber Daya Insani (SDI) difokuskan pada peningkatan kompetensi, produktivitas, dan loyalitas pegawai yang menjadi aset strategis dalam mendukung transformasi dan pertumbuhan bank. Hal ini dilakukan melalui pelatihan berkala, rotasi, dan mutasi karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pemetaan kompetensi dan talent management dilakukan dengan memberikan pelatihan serta program sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, penerapan insentif berbasis kinerja (KPI) menjadi salah satu cara untuk mendorong pencapaian target baik secara individu maupun tim.

Peningkatan budaya kerja yang Islami dan profesional juga menjadi fokus dalam penguatan SDI ini, dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, integritas, dan kolaborasi antar pegawai. Untuk meningkatkan sinergi dan menciptakan budaya kerja positif, rotasi dan mutasi pegawai dilakukan secara berkala sebagai upaya penyegaran dan pengendalian risiko. Selain itu, BPRS juga membentuk Internal Learning Center sebagai wadah untuk pengembangan berkelanjutan seluruh pegawai agar dapat terus meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR

Dalam mendukung strategi pengembangan usaha dan perluasan pasar, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menempatkan proses identifikasi dan segmentasi target pasar sebagai langkah fundamental. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim khusus data dan riset yang bertugas secara sistematis menghimpun data pelaku usaha di wilayah Yogyakarta dengan pendekatan *by name, by address, by phone*. Tim ini berperan sebagai fondasi awal dalam proses prospecting nasabah baru, penyusunan strategi penetrasi pasar, serta penyusunan kebijakan produk dan layanan yang relevan dengan karakteristik segmen yang dititik. Fokus utama tim ini adalah menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas produktif, serta individu-individu potensial yang memiliki prospek menjadi nasabah aktif.

Selain menjangkau nasabah baru, tim data dan riset juga memiliki mandat untuk menelusuri kembali data nasabah eksisting yang belum memiliki fasilitas pembiayaan atau yang pembiayaannya telah lunas, namun belum melanjutkan transaksi atau mengajukan kembali produk BPRS. Kelompok ini dinilai sebagai potensi tersembunyi yang dapat diaktifkan melalui pendekatan relasional, edukasi ulang produk, serta program loyalitas yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi retensi nasabah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan eksternal, tetapi juga memperkuat basis internal yang sudah ada.

Untuk mendukung keterhubungan yang lebih luas dan intensif dengan calon nasabah, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta juga mengelola berbagai kanal komunikasi digital yang strategis. Grup media sosial seperti WhatsApp, yang saat ini telah mencakup lebih dari 18.000 orang, dikelola secara aktif oleh tim pemasaran sebagai media penyebaran informasi, promosi produk, serta wadah interaksi dua arah antara bank dan masyarakat. Melalui kanal ini, bank dapat melakukan promosi dengan jangkauan yang luas, biaya yang efisien, serta pendekatan yang lebih personal dan interaktif. Selain itu, media digital ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya mengenai produk dan layanan berbasis prinsip syariah.

Sebagai bagian dari penguatan strategi jangka panjang, tim pemasaran juga melakukan pemetaan terhadap komunitas-komunitas dan kelompok usaha di wilayah Yogyakarta yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sasaran ekspansi mendatang. Komunitas yang dimaksud meliputi kelompok usaha bersama (KUBE), koperasi, paguyuban pedagang, serta komunitas sosial keagamaan yang memiliki struktur dan anggota aktif. Dengan pendekatan berbasis komunitas ini, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta tidak hanya berfokus pada pertumbuhan volume nasabah semata, tetapi juga membangun kedekatan dan kepercayaan jangka panjang melalui pola interaksi yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai kebersamaan. Pendekatan ini sejalan dengan visi BPRS untuk menjadi bank syariah yang inklusif, partisipatif, dan berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

PELUANG, TANTANGAN, SERTA PROSPEK USAHA KEDEPAN

BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang mempengaruhi kelangsungan serta perkembangan usaha ke depan. Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan adalah peningkatan dana murah melalui pengembangan produk yang menarik seperti Tabungan Harmoni Plus dan Tabungan Uduwah. Pendekatan berbasis komunitas serta promosi intensif melalui berbagai media juga membuka peluang untuk menjangkau segmen masyarakat produktif yang telah pulih pasca-pandemi, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY yang stabil pada tahun 2025. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga daya tarik produk dan meminimasi risiko persaingan yang semakin ketat, terutama mengingat ketidakpastian pasar pasca-pandemi yang masih mempengaruhi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, penyaluran pembiayaan yang berkualitas menjadi prioritas dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor perdagangan dengan pendekatan syariah. Peluang ini menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan, mengingat adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang semakin diterima, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada pengembangan ekonomi inklusif. Tantangan utama terletak pada pengelolaan risiko kredit yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan, terutama di sektor UMKM yang masih menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, penguatan analisis kelayakan calon nasabah dan penerapan skema group lending berbasis komunitas akan menjadi kunci untuk mengurangi risiko tersebut. Sementara itu, pengembangan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan platform online, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan akses layanan bagi nasabah, meskipun perlu dilakukan pemantauan terus-menerus terhadap potensi risiko terkait dengan kualitas aset, seiring dengan semakin berkembangnya sektor digital di DIY.

Penguatan tata kelola dan manajemen risiko melalui penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan BPRS. Dalam hal ini, tantangan utama adalah memenuhi standar kesehatan bank yang ditetapkan oleh OJK dan menjaga hubungan yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan implementasi yang efektif. Di sisi lain, kolaborasi dengan berbagai komunitas di Yogyakarta memberikan peluang untuk memperluas jangkauan produk dan layanan bank melalui sinergi dengan lembaga sosial, pendidikan, dan tokoh masyarakat yang semakin berkembang dengan semakin besarnya perhatian terhadap kegiatan sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan tim pemasaran dalam memanfaatkan data komunitas secara efektif untuk memaksimalkan potensi pasar.

Optimalisasi layanan dengan pengembangan layanan kas keliling dan sistem pelayanan berbasis teknologi juga menjadi salah satu peluang besar, terutama dalam meningkatkan loyalitas nasabah dan memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat sesuai dengan tren digitalisasi dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat dan praktis. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan kualitas layanan yang cepat, mudah, dan andal agar dapat memenuhi harapan nasabah, terutama di masa transisi menuju digitalisasi yang membutuhkan adaptasi dari masyarakat. Terakhir, penguatan sumber daya insani (SDI) melalui pelatihan, rotasi, dan mutasi karyawan yang berkelanjutan memberikan prospek positif dalam menciptakan tim yang kompeten dan produktif. Hal ini menjadi faktor penentu dalam mencapai target bisnis jangka panjang, terutama mengingat pentingnya kualitas SDM dalam mendukung perkembangan sektor perbankan syariah di DIY. BPRS juga terus mengoptimalkan penggunaan data dan riset pasar untuk memperluas penetrasi pasar serta menjaga efisiensi biaya dan struktur pemodalannya yang sehat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan demikian, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta memiliki prospek yang cerah di masa depan, meskipun tantangan yang ada memerlukan perhatian serius dalam implementasi kebijakan strategis dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kesuksesan dalam menghadapi dinamika perekonomian DIY yang terus berkembang.

PENUTUP

Alhamdulillah, Seluruh jajaran PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berhasil menyelesaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024 dengan penuh dedikasi dan berbagai upaya strategis yang telah dilaksanakan, sehingga kinerja BPRS pada tahun 2024 dapat ditutup dengan hasil yang terus mengalami perbaikan. Semua pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan kecerdasan seluruh tim, yang senantiasa diawasi oleh Direksi serta mendapat bimbingan dan arahan dari Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Kami bersyukur atas hasil yang telah tercapai berkat komitmen kuat sumber daya insani BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

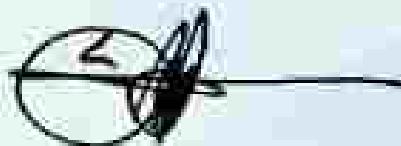
LAMJUTAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2024

Namun, kami juga menyadari bahwa kinerja kami pada tahun 2024 belum maksimal dan kurang memuaskan. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan ini dan akan terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami di masa yang akan datang. Direksi menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pemegang saham yang terus memberikan kepercayaan untuk mendorong peningkatan kinerja BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada nasabah yang telah memilih BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta sebagai mitra mereka, dari awalnya hanya sebagai alternatif kini menjadi pilihan utama berkat kualitas layanan yang kami berikan.

Kami berharap besar bahwa segala tantangan dan permasalahan yang mungkin muncul di masa mendatang dapat diselesaikan dengan baik, sehingga bank ini dapat terus berkembang dan mencapai kemajuan yang lebih signifikan. Segala usaha yang telah dilakukan kami serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT, setelah berusaha dengan sepuh hati dan doa yang tulus. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hasil terbaik yang diridhoi-Nya untuk kemajuan dan pertumbuhan PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta ke depan. Amin.

Biltahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

YOGYAKARTA, 30 APRIL 2025



JOKO RISWANTO, SE

DIREKTUR UTAMA



KRISNAWAN FARID HILAL, SP

DIREKTUR



GOOD CORPORATE GOVERNMENT (GCG)



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) sebagai fondasi penting dalam mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sejalan dengan kepentingan para pemangku kepentingan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis yang berlaku secara universal. GCG juga menjadi instrumen penting dalam penetapan tujuan perusahaan, mitigasi risiko, peningkatan kinerja berkelanjutan, serta pembiasaan budaya kerja yang sehat di lingkungan kerja.

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menyempurnakan kualitas implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan, antara lain melalui penguatan struktur organisasi, perbaikan sistem kerja, serta penyempurnaan administrasi internal dengan cara memperbarui kebijakan, pedoman kerja, dan prosedur internal lainnya. Komitmen terhadap tata kelola ini didukung penuh oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki peran sentral dalam memastikan GCG diimplementasikan secara efektif. Implementasi ini juga didukung oleh penegakan kode etik perusahaan, pengaturan operasional, serta pengawasan internal yang aktif.

GCG tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai prasyarat strategis dalam menjamin keberlangsungan dan keberhasilan usaha jangka panjang. Dengan dukungan seluruh insan perusahaan, BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat kinerja, meningkatkan perlindungan bagi para pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika yang berlaku di industri perbankan.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya: POJK No. 09 Tahun 2024 serta SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan GCG bagi BPRS, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada OJK sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) di PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa berlandaskan pada asas-asas yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya melalui Peraturan OJK (POJK) No. 09 Tahun 2024 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah (BPRS). Kedua regulasi ini menjadi pedoman utama dalam membangun sistem pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

LAMPUAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaannya, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai elemen strategis dalam penerapan prinsip GCG. Keduanya memiliki peranan vital dalam menjaga integritas tata kelola, menetapkan arah kebijakan, serta memastikan pengendalian internal berjalan efektif.

Sebagai lembaga keuangan syariah, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usahanya, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh jajaran pengurus dan karyawan serta pemangku kepentingan BPRS diharapkan agar senantiasa berpegang pada prinsip tata kelola dalam melakukan aktivitas yang meliputi:



Membuka diri terhadap pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi dan golongan, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan



Ketepatan dalam pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab di setiap tingkatan organisasi, memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berjalan dengan efektif, efisien, dan terarah, sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan.



Independensi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang di PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta dengan memastikan bahwa setiap langkah diambil secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal, sambil tetap mematuhi peraturan-perundang-undangan yang berlaku.



Independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BPRS dengan tetap sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.



Keadilan dan ketepatan di dalam mematuhi hak-hak serta memastikan pelaksanaan yang adil, seperti seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus mendapat perlakuan yang sama dalam setiap aspek pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan.

REFERENSI REGULASI

PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Alquran dan Hadist, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh regulator, kebijakan internal, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) sesuai dengan regulasi.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem tata kelola yang berintegritas, seluruh kebijakan dan pedoman internal terkait GCG juga disusun dengan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mendukung arah dan strategi bisnis PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta secara berkelanjutan.

Adapun sejumlah regulasi yang menjadi dasar dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola tersebut tercantum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- POJK Nomor 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- POJK Nomor 09 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Bagi BPRS
- POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Manajemen Risiko Bagi BPRS
- POJK Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
- POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko
- SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPRS

STRUKTUR TATA KELOLA

PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah membentuk struktur tata kelola perusahaan yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas usaha dan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Struktur tata kelola ini juga berfungsi sebagai fondasi dalam mewujudkan praktik tata kelola yang efektif melalui keberadaan mekanisme pengawasan yang memadai, sistem pengendalian internal yang kuat, serta pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas di seluruh jenjang organisasi. Adapun struktur tata kelola yang diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta adalah sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta yang memiliki kewenangan penuh atas pengantilan keputusan strategi perusahaan, sesuai tidak dipisahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, RUPS bermetode berkedudukan pada ketentuan Anggaran Dasar perusahaan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (BCG) dengan tetap memperhatikan keballungan usaha, kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), serta perlindungan atas hak-hak Pemegang Saham.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sebagai organ pengel, dan tertinggi setelahnya, Dewan Komisaris PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menjalankan peran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan arahan dan arahan strategis guna mendukung pencapaian usaha dan pengembangan usaha dan perusahaan secara keseluruhan.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Merupakan organ dalam struktur Bank yang berperan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi, serta menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan operasional Bank guna memastikan seluruh aktivitas keaktifan syariah dengan prinsip-prinsip syariah.

RAPAT DIREKSI

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola operasional perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (BCG). Secara pelaksanaan fungsinya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan usaha, menjaga kesehatan perusahaan, serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan perlindungan atas hak-hak pemegang saham.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta Komite Pemantau telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan seluruhnya telah melaksanakan perannya sesuai dengan fungsi yang diemban. Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tata kelola, dengan tetap mengacu pada kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ. Dengan pengaturan tersebut, peran setiap organ, baik secara kolektif maupun individu, dapat dijalankan secara terarah dan optimal.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

NAMA	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Joko Rawanto, SE	Direktur Utama	- Direksi memikul tanggung jawab utama atas seluruh proses pengelolaan dan operasional perusahaan sesuai perannya sebagai organ pengurus BPR. - Direksi menyusun dan mengimplementasikan visi, misi, strategi, serta rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk menyusun Rencana Bisnis-Bank dan kebijakan kepengurusan yang mendukung pencapaian target sesuai anggaran yang ditetapkan. - Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berkewajiban mengelola perusahaan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar serta mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. - Direksi harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) diterapkan secara konsisten dalam seluruh aspek pengelolaan perusahaan. - Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan, serta pengembangan kebijakan dan budaya terkait Kepatuhan, Manajemen Risiko, serta program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). - Direksi wajib merespons dan menindaklanjuti setiap hasil audit maupun rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal, pengawas internal maupun eksternal, serta regulator sesuai ketentuan hukum yang berlaku. - Direksi mengambil inisiatif strategis dan pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan kebijakan internal, hukum yang berlaku, dan ketentuan syariah secara konsisten. - Direksi bertanggung jawab dalam membangun dan menginternalisasi budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi dan dalam setiap aktivitas perusahaan. - Direksi terus mengembangkan dan mengaplikasikan keahlian profesionalnya dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan. - Direksi memiliki tanggung jawab dalam menyusun serta mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, menjunjung mutu layanan, mencapai target pembiayaan, serta mengelola pengembangan dan penilaian kinerja sumber daya manusia.
Khranawan Farid Hifal, SP	Direktur Tanggung Jawab Fungsi Keputusan	

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

NAMA	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pohadi SH	Komisaris Utama	• Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan perannya dengan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap pengawasan dan pengambilan keputusan. • Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan dan kemajuan perusahaan.
Juanda SE	Komisaris	• Komisaris bertugas memberikan arahan strategis mengenai pelaksanaannya, serta menilai efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. • Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa Direksi melaporkan secara tepat dan tuntas terhadap semua temuan atau rekomendasi dari pengawasan internal maupun eksternal serta otoritas yang berwenang. • Dewan Komisaris wajib menyusun dan memberlakukan aturan kerja internal yang menjadi acuan dan kewajiban seluruh anggotanya dalam menjalankan tugas. • Komisaris berkewajiban melaporkan kepada OJK apabila terjadi pelanggaran hukum atau kondisi yang berpotensi mengancam keberlanjutan bisnis perusahaan. • Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris tidak diperkenankan terlibat langsung dalam keputusan operasional harian, kecuali dalam hal yang secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti terkait penyediaan dana kepada pihak terkait.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

NAMA	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Dra. Abdul Halim MHum	Anggota Dewan Pengawas Syariah	• DPS harus menjalankan fungsinya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sejalan dengan prinsip syariah dalam setiap pengawasan dan pengambilan keputusan. • DPS bertugas menilai dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur operasional bank telah sejalan dengan ketentuan syariah yang berlaku. • DPS wajib mengawasi dan menilai bahwa setiap produk baru yang dikembangkan bank tidak menyimpang dari fatwa syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. • Apabila suatu produk baru belum memiliki landasan hukum syariah, DPS bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI. • DPS perlu melakukan penilaian rutin terhadap cara bank menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan layanan guna memastikan semuanya tetap sesuai prinsip syariah. • DPS harus mengadakan rapat internal minimal satu kali setiap triwulan untuk membahas isu dan pengawasan syariah. Setiap pelaksanaan rapat DPS harus didokumentasikan dalam bentuk risalah sebagai bukti administrasi dan referensi pelaksanaan pengawasan syariah.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN AFILIASI

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta tidak memiliki kepemilikan saham, baik di BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta sendiri maupun pada perusahaan lain. Informasi ini tercantum secara rinci dalam tabel berikut.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BPRS MHY		Perusahaan Lainnya	
		Nominal (Rp)	Porsi (%)	Nominal (Rp)	Porsi (%)
Joko Riswanto, SE	Direktur Utama	Nihil	-	Nihil	-
Krisnawan Farid Hilal, SP	Direktur YMFE	Nihil	-	Nihil	-

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, ataupun entitas anggota Direksi. Penjabaran lebih lanjut mengenai potensi hubungan keuangan atau hubungan keluarga antara Direksi dengan Komisaris, DPS, maupun pemegang saham disampaikan dalam tabel berikut.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan			
		Anggota Direksi Lain	Anggota Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
Joko Riswanto, SE	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Krisnawan Farid Hilal, SP	Direktur YMFE	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta tidak memiliki kepemilikan saham, baik di BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta sendiri maupun pada perusahaan lain. Informasi ini tercantum secara rinci dalam tabel berikut.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BPRS MHY		Perusahaan Lainnya	
		Nominal (Rp)	Porsi (%)	Nominal (Rp)	Porsi (%)
Rohadi, SH	Komisaris Utama	Nihil	-	Nihil	-
Juanda, SE	Komisaris	Nihil	-	Nihil	-

LANJUTAN: KEPEMILIKAN SAHAM DAN Afiliasi

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, ataupun antar anggota Dewan Komisaris. Penjabaran lebih lanjut mengenai potensi hubungan keuangan atau hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan Direksi, DPS, maupun pemegang saham disampaikan dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
Rohadi, SH	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Iuanda, SE	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta tidak memiliki kepemilikan saham, baik di BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta sendiri maupun pada perusahaan lain. Informasi ini tercantum secara rinci dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BPRS MHY		Perusahaan Lainnya	
		Nominal (Rp)	Porsi (%)	Nominal (Rp)	Porsi (%)
Drs. Abdul Halim, Mhum	Anggota DPS	Nihil	-	Nihil	-

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, ataupun antar anggota Dewan Pengawas Syariah. Penjabaran lebih lanjut mengenai potensi hubungan keuangan atau hubungan keluarga antara Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham disampaikan dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dan Keuangan			
		Anggota Direksi	Anggota Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
Drs. Abdul Halim, Mhum	Anggota DPS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

RANGKAP JABATAN

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta merangkap jabatan pada perusahaan lain (BPR/BPRS) yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi terkait rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	BPR/ BPRS	Jabatan
Rohadi SH	Komisaris Utama	BPR Nusamba Banguntapan	Komisaris Utama
		BPR Nsisamtra Temon	Komisaris Utama
Iyanda SE	Komisaris	BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	Komisaris Utama

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta merangkap jabatan lebih dari 1 BPRS lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi terkait rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	BPR/ BPRS	Jabatan
Drs. Abdul Halim, Mhum.	Anggota DPS	BPRS Mitra Amal Mulia	Anggota DPS
		BPRS Mitra Harmoni Semarang	Anggota DPS

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Selama tahun buku 2024, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta tidak mengalami atau terlibat dalam permasalahan hukum yang bersifat pidana maupun perdata, baik yang melibatkan institusi secara langsung maupun tidak langsung. Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat gugatan hukum, proses persidangan, atau perkara lain yang diajukan oleh pihak ketiga maupun regulator kepada Perseroan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas usaha sehingga dalam operasional PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta tidak melakukan transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi pihak internal dengan kepentingan perusahaan. Tidak ditemukan indikasi adanya keputusan atau aktivitas bisnis yang melibatkan konflik kepentingan antara pengurus, pegawai, maupun pihak terkait lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan prinsip transparansi sesuai dengan tata kelola yang baik.

PELAKSANAAN APU, PPT, & PPSTM

PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan serta POJK yang berlaku terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan internal dan prosedur operasional yang secara konsisten diterapkan di seluruh lini operasional bank.

Dalam setiap interaksi dan transaksi dengan nasabah, seluruh karyawan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam proses identifikasi dan verifikasi identitas nasabah yang merupakan bagian dari penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Proses ini dilaksanakan secara menyeluruh baik pada saat awal pembukaan rekening, penentuan transaksi nasabah, maupun dalam pelaporan transaksi yang mencungkil sesuai dengan ketentuan dan prioritas pengawas.

Bank juga secara aktif mengikuti perkembangan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta menyesuaikan sistem dan prosedur yang ada agar senantiasa sejalan dengan standar kepatuhan yang ditetapkan.

Sebagai hasil dari konsistensi penerapan prinsip APU, PPT, & PPSTM, PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta memperoleh peringkat BAIK dalam penilaian Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF). Peringkat ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan dan pengelolaan risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta menunjukkan kontribusi aktif bank dalam mendukung upaya pencegahan oleh otoritas dan aparat penegak hukum.

KEBIJAKAN DIREKSI

Hingga akhir periode pelaporan pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen BPR Syariah telah menyusun dan menetapkan sejumlah kebijakan strategis sebagai bentuk implementasi prinsip tata kelola yang baik serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya meliputi kebijakan-kebijakan berikut:

- Pembentukan Unit Kerja Deskcoll & Penetapan SOP Deskcoll
- Batas Kapitalisasi Aset Tetap & Inventaris
- Pengkinian Batas Wewenang Memutus Pembiayaan
- Ketentuan Review Berkas Pembiayaan Sebelum Komite
- Ketentuan Jenis Agunan, Batasan Akad dan Pengikatannya, Sakai Akad, Pembiayaan Kepada Pihak Terkait, dan Monitoring Agunan
- Pemberlakuan Pedoman Penerapan SAF, Penunjukan Tim SAF, dan Pengelolaan Whistleblowing System.

HASIL IMPLEMENTASI TATA KELOLA

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Setiap aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip etika bisnis, serta praktik terbaik di industri perbankan. Selain itu, bank juga secara proaktif melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan operasional.

Selama tahun 2024, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta masih dalam proses penyempurnaan struktur organisasi serta pelengkapan susunan pengurus perusahaan secara menyeluruh. Meski demikian, Bank telah menetapkan dan menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung atas fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).

Sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas penerapan tata kelola yang telah dilakukan, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta juga melaksanakan self assessment atau penilaian mandiri, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 POJK Nomor 9 Tahun 2024. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola yang wajib disusun dan disampaikan pada setiap akhir tahun buku, dengan muatan informasi paling sedikit sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI FAKTOR
- Aspek Pemegang Saham - Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi - Pelaksanaan Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite - Penanganan Benturan Kepentingan - Penerapan Fungsi Kepatuhan - Penerapan Fungsi Audit Intern - Penerapan Fungsi Audit Ekstern - Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud - Batas Maksimum Penyaluran Pembiayaan - Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi - Rencana Bisnis BPRS	- Nilai 2 (Memadai) - Nilai 1 (Sangat Memadai) - Nilai 3 (Cukup Memadai) - Tidak Dirilis - Nilai 1 (Sangat Memadai) - Nilai 2 (Memadai) - Nilai 1 (Sangat Memadai) - Nilai 1 (Sangat Memadai) - Nilai 2 (Memadai) - Nilai 2 (Memadai) - Nilai 1 (Sangat Memadai) - Nilai 1 (Sangat Memadai)

Berdasarkan self-assessment yang dilakukan terhadap implementasi tata kelola, bank memperoleh Nilai Komposit 3 dengan peringkat "Cukup Baik". Penilaian ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang menjadi indikator utama dalam penerapan tata kelola yang efektif. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dan sesuai ketentuan dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, Bank dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Direksi memastikan bahwa penyelenggaraan Teknologi Informasi berjalan sebagaimana mestinya dan sejalan dengan pencapaian visi dan misi BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, bank bekerja sama dengan pihak penyedia jasa TI yaitu PT. Assiat Software Indonesia Pratama dengan core banking system atau AIP. Kerjasama tersebut berjalan sejak tanggal 26 Desember 2018. Aplikasi inti perbankan yang disediakan oleh PT. Assiat Software Indonesia Pratama adalah Aplikasi Assiat-BPRS.Net yang berbasis online web base dan menurut kami secara umum telah mampu memenuhi standar yang diperlukan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang ada. Adapun standar minimal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan dalam SAK ETAP dan PAPS/ BPRS
2. Mampu melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor secara online real time.
3. Mampu menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan ekstern.
4. Mampu mengkonsolidasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi layanan BPRS untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
5. Mampu mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu (Single customer Identification File)

Dalam rangka pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, BPRS menerapkan manajemen proyek untuk memastikan penyelenggaraan TI telah dikembangkan dengan struktur yang baik dan telah mengakomodasi kebutuhan pengguna serta sesuai dengan Teknologi Informasi yang dimiliki BPRS. Penerapan manajemen proyek dilakukan oleh suatu tim kerja yang memiliki anggota paling sedikit berasal dari satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi. Tim kerja melaporkan setiap proses pengembangan dan pengadaan kepada Direksi.

Dalam implementasi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi di BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta Pada tahun 2024 pihak internal BPRS maupun penyedia jasa teknologi informasi fokus pada penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Layanan Assiat-BPRS.Net, beberapa di antaranya adalah:

LANJUTAN: PENYELENGGAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengadaan fitur tambahan dari aplikasi Assist-BPRS.Net untuk pelaporan data OBOX GJK.
2. Penyempurnaan dan penyesuaian dalam pengembangan website perusahaan dengan alamat www.bpramh-yogyakarta.com. Pentingnya website di era digital sekarang ini menjadi suatu keharusan dan mempengaruhi pertumbuhan bisnis perusahaan. Informasi profil perusahaan dan produk produk layanan tabungan deposito dan pembiayaan serta laporan keuangan publikasi perusahaan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
3. Pengembangan selanjutnya bekerjasama dengan Perbarindo dan Dinas Kependudukan (Dukcapil) dalam penyelenggaraan layanan data kependudukan melalui Aplikasi Sharing Bandwith. Penggunaan aplikasi tersebut dilakukan penyempurnaan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dalam rangka penerapan sertifikasi standar keamanan dan keandalan system yang bekerjasama dengan Perbarindo dalam proses ISO 27001 : 2022.
4. Layanan WhatsApp Business API. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti layanan pesan, verifikasi, pesan notifikasi, promosi dll. Layanan notifikasi WhatsApp Business API memudahkan bps untuk menjangkau end-customer secara langsung melalui notifikasi WhatsApp dengan lebih cepat melalui aplikasi perpesanan yang telah populer di tengah Masyarakat.
5. Virtual account yang menjadi salah satu metode pembayaran yang praktis dan efisien. BPRS menggunakan produk dari bank umum yaitu Bank Permata Syariah dalam penggunaan Virtual Account. Setiap nasabah memiliki nomor rekening virtual yang unik. Nasabah bisa menggunakan nomor rekening yang dapat digunakan untuk transaksi pengiriman uang secara real-time. Salah satu kelebihan utama dari virtual account bank Permata adalah kemampuannya untuk mengirimkan uang secara real-time. Transaksi pembayaran yang dilakukan dengan nomor VA akan diproses dengan cepat, sehingga nasabah tidak perlu menunggu berlama-lama untuk memastikan pembayaran diterima oleh BPRS.
6. Aplikasi Admin dan Proposal Pembiayaan. BPRS menggunakan aplikasi penunjang dalam proses input dokumentasi berkas pembiayaan. Aplikasi Input Data - Pembiayaan yang selanjutnya disebut "Aplikasi" merupakan software yang dapat membantu bagian Administrasi Pembiayaan dalam melakukan pencatatan data nasabah pembiayaan yang terpedu, dengan beragam fitur yang dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan entri data.

Sedangkan untuk teknologi jaringan PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta menyediakan sarana email dengan alamat mhy_syariah@yahoo.co.id. Selain itu juga telah disediakan website perusahaan dengan alamat www.bpramh-yogyakarta.com dan social media yang di dalamnya memuat tentang Informasi Bank menyangkut produk-produk dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat diakses langsung oleh umum. Di harapkan dengan sarana teknologi digital sekarang ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Informasi merupakan aset yang sangat vital bagi PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta, mencakup data nasabah, informasi keuangan, operasional, hingga pelaporan internal dan eksternal. Kebocoran, kerusakan, atau gangguan terhadap informasi tersebut dapat menimbulkan risiko besar, baik secara finansial maupun reputasi, yang tidak hanya berdampak bagi Bank dan nasabah, tetapi juga terhadap kestabilan sistem perbankan secara umum. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi melalui penerapan kebijakan pengamanan informasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia di lingkungan kerja.

Dalam rangka menjaga keamanan sistem jaringan dan komunikasi data, Bank telah menetapkan fungsi pengendalian jaringan yang dilakukan oleh petugas TI di bawah supervisi Kepala Bidang Operasional. Operasional jaringan didokumentasikan dalam instruksi kerja yang diperiksa secara berkala setiap tahun. Bank juga telah mengimplementasikan sistem keamanan seperti firewall, intrusion detection/prevention system, serta penggunaan antivirus yang diperbarui secara rutin. Penggunaan akses internet diatur secara ketat dengan pemblokiran terhadap situs-situs yang mengandung konten yang tidak sesuai dengan etika dan kebijakan perusahaan, seperti konten dewasa, perjudian, kekerasan, hingga situs yang berpotensi mengandung malware.

Selanjutnya, dalam hal perlindungan sistem informasi, Bank menerapkan segmentasi jaringan internal dan eksternal dengan sistem Firewall NAT serta pemisahan akses menggunakan VPN, VLAN, dan pengaturan akses berbasis IP. Pengelolaan firewall dilakukan melalui tahapan perencanaan dan penilaian risiko terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengujian perangkat oleh Dirakor sebelum instalasi, serta pengendalian akses fisik di ruang server dengan pengawasan ketat oleh petugas TI. Seluruh perubahan konfigurasi firewall hanya dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan otorisasi resmi, untuk memastikan bahwa setiap perubahan sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan informasi Bank.

Dalam hal pengendalian akses pengguna, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta memberlakukan kebijakan ketat terhadap penggunaan password, mulai dari pemberian password awal yang bersifat unik, prosedur penggantian password saat login pertama, hingga kewajiban menjaga kerahasiaan password oleh setiap pengguna. Password harus memenuhi standar kekuatan tertentu, termasuk kombinasi karakter, panjang minimum, dan tidak didasarkan pada data pribadi. Selain itu, sistem inti Bank (OBS) juga mendukung keamanan ini dengan fitur pengingat otomatis agar pengguna mengganti password secara berkala setiap tiga bulan. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank untuk menjaga keamanan informasi secara menyeluruh, mendukung praktik tata kelola TI yang baik, dan melindungi kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah yang dijalankan.

LANJUTAN KEAMANAN INFORMASI

Sebagai bagian dari strategi pengamanan informasi dan pemulihan bencana, PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta bekerja sama dengan Assiatindo sebagai penyedia layanan teknologi informasi inti (core system). Assiatindo memiliki Data Center utama yang berlokasi di Kantor Pusat Malang, tepatnya di Perumahan Pondok Glimbing Indah Blok E-1 No. 14. Di lokasi ini, penyimpanan Database Core Banking System (CBS) serta Source Code aplikasi dilakukan melalui dua server, yakni Network Access Storage 1 (NAS1) sebagai media penyimpanan utama dan Network Access Storage 2 (NAS2) yang berfungsi sebagai server cadangan (replikasi) dan media backup otomatis apabila terjadi gangguan pada NAS1. Infrastruktur ini memastikan kelangsungan operasional sistem CBS Bank secara konsisten dan aman.

Dengan keseluruhan pendekatan pengamanan informasi ini – mulai dari perlindungan jaringan internal, pengelolaan akses pengguna, segmentasi data, hingga kesiapan pemulihan bencana – PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta terus memperkuat ketahanan sistem informasinya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola teknologi informasi yang baik, serta merupakan bagian integral dari upaya Bank dalam menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan operasional digital yang aman dan terpercaya.

The logo features a large, stylized circular emblem. The outer ring is a thick, dark teal color with a hand-painted, brushstroke-like texture. Inside this ring is a lighter teal circle, also with a brushstroke texture. The center of the logo is a solid, light green circle. The text is centered within this green circle. To the right of the text is a small icon consisting of two slanted, parallel bars, one dark teal and one light green.

bank syariah
mitra harmoni

bprs mitra harmoni yogyakarta